

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT
JENDERAL
PENGENDALIAN DAS
DAN HUTAN
LINDUNG

2018



KEMENTERIAN LHK

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG
TAHUN 2018



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG



IB PUTERA PARTHAMA, Ph.D.
Direktur Jenderal PDASHL

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) tahun 2018 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Ditjen PDASHL atas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.

Akuntabilitas kinerja Ditjen PDASHL tahun 2018 diukur berdasarkan penetapan ukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Direktur Jenderal PDASHL tahun 2018 serta sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen PDASHL tahun 2015-2019.

Dalam laporan ini disampaikan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang merupakan hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja, dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja sasaran Ditjen PDASHL tahun 2018 adalah sebesar 100,35%, dengan capaian pelaksanaan anggaran sebesar 95,44%. Sehingga kinerja Ditjen PDASHL tahun 2018 masuk kategori sangat baik dan efisien.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PDASHL tahun 2018. Kiranya laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



Jakarta, Februari 2019

[Handwritten signature]

IB PUTERA PARTHAMA, Ph.D.

NIP. 195605021986031001



Desa Sumberjati - Kec. Tempel - Lumsajang

-8°12'58", 113°11'9" - 90.5m, 208°

04/10/2018 09:33:53

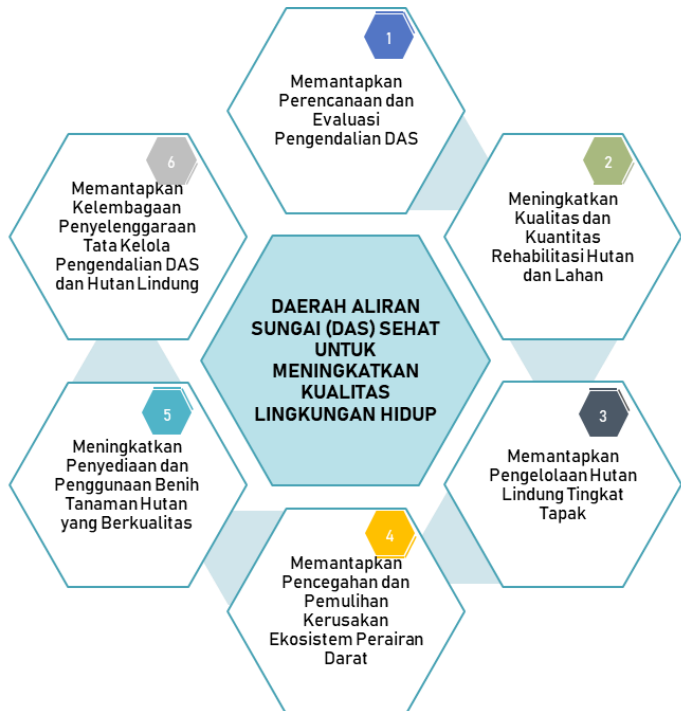
RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2015-2019 telah ditetapkan tema Ditjen PDASHL yang merupakan tujuan normatif pembangunan bidang PDASHL. Upaya strategis untuk mewujudkan tema ini dituangkan ke dalam sub tema Ditjen PDASHL dan ditetapkan tujuan sebagai arah dari setiap tema. Untuk menjamin terlaksananya tema dibuat strategi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Setiap program ini ditetapkan *outcome* dan setiap kegiatan ditetapkan *output*-nya. Capaian *outcome* dan *output* diukur dengan capaian indikator sebagai sasaran dan target kinerjanya. Target kinerja ini disusun dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, Direktorat Jenderal PDASHL menetapkan tema sebagai berikut “Daerah Aliran Sungai (DAS) Sehat untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”.

Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, didukung 6 (enam) sub tema yang menjadi

pilar dalam rangka pencapaian tema pembangunan bidang PDASHL, yaitu :



Dalam rangka pencapaian tema dan sub tema Ditjen PDASHL tersebut di atas, pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung melalui program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran program Ditjen PDASHL tahun 2018 sangat baik yaitu sebesar 100,35% dari target yang ditetapkan. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran dinyatakan berhasil karena capaiannya lebih dari 100%. Capaian tersebut terdiri dari :

1. Luas tutupan hutan dan hasil rehabilitasi dengan capaian kinerja sebesar 100,10%;
2. Pembangunan konservasi tanah dan air (dam penahan, *gully plug*, sumur resapan air) dengan capaian kinerja sebesar 100,94%;
3. Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.

Untuk mendukung capaian kinerja program telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar 95,44% atau sebesar Rp. 1.035.296.933.819,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.084.817.437.000,-. Berdasarkan pengukuran efisiensi (ratio kinerja fisik dengan kinerja keuangan diperoleh nilai 1,05 sehingga termasuk ke dalam katagori efisien.

Keberhasilan pembangunan di bidang Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung tidak hanya ditentukan oleh kinerja Ditjen PDASHL bersama Unit Pelaksana Teknis di daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan di sektor lain bahkan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat yang ikut berperan dalam pencapaian kinerja Ditjen PDASHL.



DAFTAR ISI

i	KATA PENGANTAR	
iii	RINGKASAN EKSEKUTIF	
v	DAFTAR ISI	
01	PENDAHULUAN	1
	LATAR BELAKANG	2
	POTENSI DAN PERMASALAHAN	5
	TUGAS DAN FUNGSI	6
	STRUKTUR ORGANISASI	7
02	PERENCANAAN KINERJA	9
	VISI, MISI, TEMA DAN SUB TEMA	10
	RENCANA STRATEGIS DITJEN PDASHL TAHUN 2015 - 2019	11
	RENCANA KERJA DITJEN PDASHL TAHUN 2018	14
	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	20
03	AKUNTABILITAS KINERJA	21
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
	REALISASI ANGGARAN	50
04	PENUTUP	53
	LAMPIRAN	58

“Pemberdayaan masyarakat sekitar dalam kegiatan pembuatan bibit di Persemaian Permanen Purwakarta wilayah kerja BPDASHL Cimanuk Citanduy”

Bagian Program dan Evaluasi
Setditjen PDASHL





01

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi habis menjadi sekitar 17.000 Daerah Aliran Sungai (DAS), mulai dari DAS-DAS yang berukuran besar dengan luas diatas 7 juta hektar hingga DAS-DAS yang berukuran kecil yang belum memiliki nama.

Dalam kurun lima tahun terakhir bencana alam sering melanda wilayah Indonesia. Pada waktu musim hujan terjadi banjir dan tanah longsor, sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kerugian akibat bencana alam ini sangat besar, bukan hanya dari hitungan materi tapi juga menyebabkan korban jiwa manusia. Kondisi ini

mencerminkan adanya penurunan daya dukung DAS di hampir seluruh Indonesia. Beberapa DAS telah mengalami degradasi sehingga daya dukungnya menjadi kurang optimal dalam mendukung kesejahteraan manusia. Untuk itu DAS harus dikelola secara terpadu baik secara biofisik, sosial ekonomi, maupun kelembagaan dan budaya.

Degradasi hutan dan lahan pada DAS di Indonesia sudah relatif mengkhawatirkan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar lahan kritis dan hutan rusak adalah akibat dari intensifnya sentuhan masyarakat dalam kerangka ekonomi dan budaya lokal maupun gabungan keduanya. Rendahnya kesejahteraan masyarakat dalam dan di sekitar hutan, tidak diterapkannya kaidah konservasi serta lemahnya kelembagaan masyarakat merupakan faktor penyebab timbulnya lahan kritis.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan

Hutan Lindung mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung. Sedangkan sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta arah kebijakan dan strategi nasional, Ditjen PDASHL menjadi penanggungjawab Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. Sebagaimana mandat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2015-2019, penanganan pemulihan DAS akan diprioritaskan pada 15 DAS yaitu DAS Citarum, Ciliwung, Serayu, Solo, Brantas, Cisadane, Kapuas, Siak, Musi, Asahan Toba, Jeneberang, Saddang, Moyo, Way Sekampung dan Limboto.

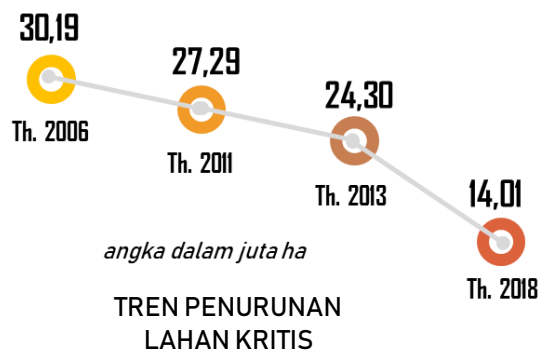
Berbagai upaya memperbaiki kondisi DAS telah dan akan terus dilaksanakan, salah satunya melalui upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Kegiatan ini dilaksanakan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dengan pola vegetatif (reboisasi,

hutan rakyat, penghijauan lingkungan) maupun sipil teknis (dam penahan, dam pengendali, sumur resapan air, *gully plug*, teras siring, dan lain-lain). Penyelenggaraan RHL ini didukung oleh benih dan bibit tanaman yang berkualitas sesuai tujuan RHL.

Upaya lain yang dilaksanakan melalui penanggulangan kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan yang diarahkan pada upaya perluasan kesempatan berusaha, peningkatan sinergi dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

Meskipun luas lahan kritis saat ini menunjukkan penurunan, bukan berarti sepenuhnya mengklaim kesuksesan dalam melakukan RHL. Ada penyesuaian kriteria dalam menghitung lahan kritis tahun 2018. Definisi lahan kritis tahun sebelumnya ditetapkan berdasarkan tutupan lahan, erosi, topografi, manajemen lahan dan batuan singkapan. Sedangkan parameter penetapan lahan kritis saat ini berdasarkan UU KTA 37 tahun 2014 berupa tutupan lahan, erosi, dan kehilangan tanah.

Luas lahan kritis (kriteria sangat kritis dan kritis) pada tahun 2006 seluas 30,20 juta hektar, tahun 2011 seluas 27,29 juta hektar, tahun 2013 seluas 24,30 juta hektar serta tahun 2018 seluas 14,01 juta hektar.



Realisasi penanaman selama periode 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2015-2017 adalah sebanyak 3.229.667.778 batang. Kegiatan penanaman pohon tersebut diyakini memberi pengaruh positif terhadap peningkatan perbaikan daya dukung DAS. Hal ini terlihat dari sumbangsih kegiatan RHL terhadap penurunan lahan kritis.

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014, Ditjen PDASHL sebagai Unit Organisasi Eselon I pada KLHK wajib menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat (Menteri LHK) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Direktorat Jenderal PDASHL memiliki sumber daya yang menjadi potensi untuk mencapai target-target pembangunan dan juga mempunyai permasalahan yang dapat menghambat upaya untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

POTENSI

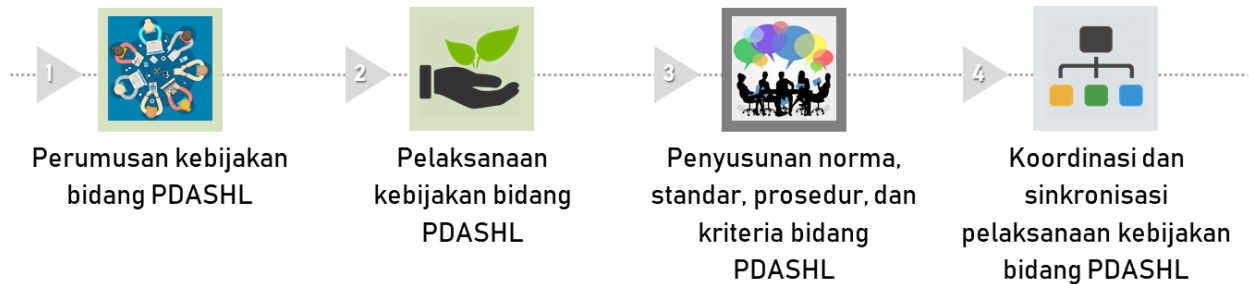
1. Adanya perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan PDASHL seperti mandat dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 2 Tahun 1992, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 37 Tahun 2014, PP Nomor 44 Tahun 1995, PP Nomor 76 Tahun 2004, PP Nomor 37 Tahun 2012 dan peraturan lainnya. Tersedianya NSPK kegiatan bidang PDASHL (RPDAST, RTk RHL, RP RHL, RPHJP). Instrumen NSPK ini telah berjalan di daerah dan pada beberapa daerah menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan penanganan DAS maupun rehabilitasi.
2. Adanya unit organisasi yang menangani PDASHL di pusat dan daerah. Unit organisasi di pusat terdiri dari enam eselon II dan di daerah terdapat 36 Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon III yang tersebar di hampir seluruh provinsi.
3. Berpengalaman melaksanakan kegiatan RHL. Jajaran Ditjen PDASHL telah berpengalaman melaksanakan reboisasi dan penghijauan sejak tahun 1970-an, sehingga dapat menjadi modal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan RHL.
4. Berpengalaman melaksanakan kegiatan pro lingkungan dan pro masyarakat. Kegiatan-kegiatan pada bidang PDASHL senantiasa untuk memperbaiki lingkungan dan bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat langsung.
5. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersebar di pusat dan daerah. Saat ini tersedia Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Ditjen PDASHL sekitar 2.057 personil yang tersebar di pusat sebanyak 234 personil dan di UPT sebanyak 1.823 personil.
6. Memiliki sarana dan prasarana di pusat dan daerah. Hampir seluruh UPT telah memiliki kantor dan sarana pendukung seperti kendaraan roda-2, roda-4, roda-6, laboratorium dan lain-lain.
7. Tersedianya 50 unit Persemaian Permanen. Persemaian permanen menghasilkan minimal 37,5 juta batang bibit tanaman hutan setiap tahun, untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman oleh masyarakat.
8. Memiliki jaringan yang luas terkait pengelolaan DAS. Kerjasama dengan para *stakeholders* telah terjalin sejak lama dan dengan jaringan yang luas.

PERMASALAHAN

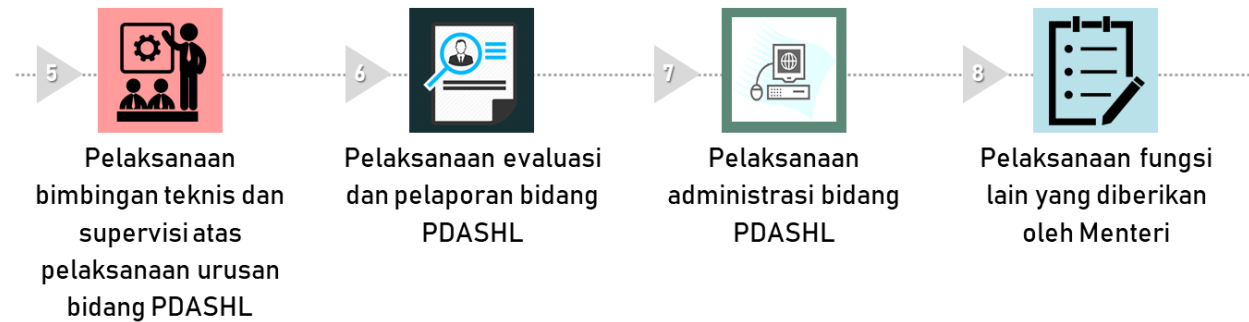
1. Jumlah SDM teknis dan administrasi terbatas dan tidak tersebar secara proporsional. Tenaga administrasi keuangan dan teknis pada umumnya menjelang masa purna bakti dan penambahan ASN lebih rendah dibanding yang pensiun.
2. Teknologi informasi bidang PDASHL belum berjalan secara maksimal. Kecanggihan teknologi saat ini masih sulit diadaptasi Ditjen PDASHL untuk menginformasikan hasil kinerja kepada publik dengan berbagai alasan teknis. Hal ini terjadi terutama pada UPT di daerah.
3. Kurang pengalaman di bidang pengelolaan kawasan hutan lindung. Kultur pekerjaan di Ditjen PDASHL selama ini cenderung ke perencanaan DAS dan upaya RHL, sedangkan pengalaman di bidang pengelolaan kawasan hutan secara menyeluruh masih rendah.
4. Data dan informasi belum optimal (update dan akurat). Data dan informasi pembangunan PDASHL belum tersaji dalam kurun waktu yang lebih singkat, sehingga informasi-informasi tertentu di lapangan terlebih dahulu di publish oleh media dibanding informasi dari UPT.
5. Standar biaya kegiatan rehabilitasi yang rendah. Tingginya target rehabilitasi belum didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai, sehingga disiasati dengan penyesuaian kegiatan (penghijauan dengan KBR) agar target kinerja dapat tercapai. Biaya pendukung RHL masih rendah (pengawasan, monitoring dan evaluasi serta penguatan kelompok).
6. Lemahnya pengawasan peredaran benih/bibit. Pengawasan peredaran benih/bibit tanaman kehutanan masih lemah karena belum didukung oleh regulasi yang kuat dan sumberdaya manusia.
7. Produksi bibit berkualitas dari persemaian permanen masih rendah. Tingginya ragam jenis yang dikembangkan pada persemaian permanen karena menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, berdampak pada rendahnya kualitas bibit karena bukan berasal dari sumber benih yang direkomendasikan, kecuali untuk lima jenis bibit (sengon, jati, gmelina, mahoni dan jabon).
8. Terbatasnya anggaran. Ketersediaan anggaran untuk mencapai kinerja yang diharapkan masih rendah.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2015, Ditjen PDASHL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.



8 Fungsi Ditjen PDASHL dalam Pelaksanakan Tugas

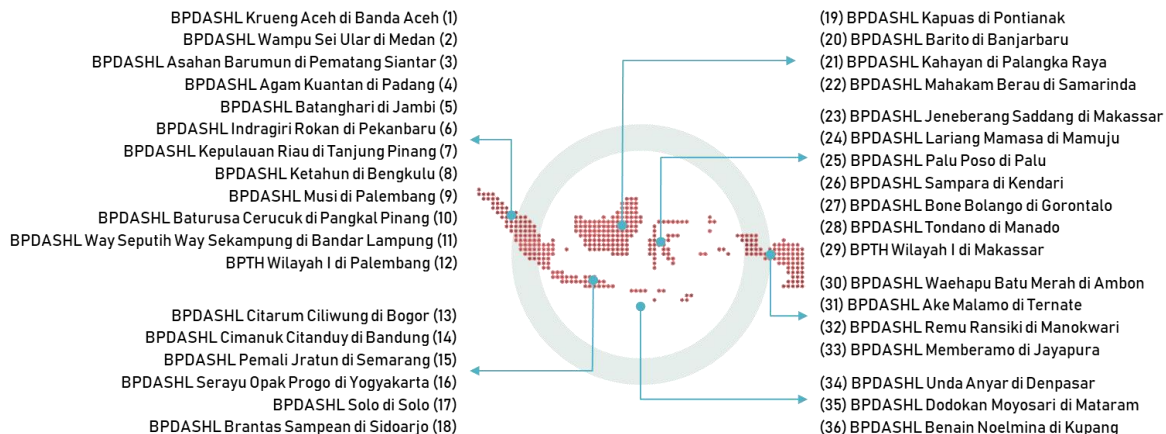


D. STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Ditjen PDASHL tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sementara organisasi dan tata kerjanya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18



Tahun 2015. Untuk penataan kelembagaan UPT lingkup Ditjen PDASHL mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan.



“Membangun sinergitas menyusun perencanaan dan evaluasi dengan menggunakan Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA)”

Bagian Program dan Evaluasi
Setditjen PDASHL





02

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI, TEMA DAN SUB TEMA

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal PDASHL telah menetapkan tema yaitu “Daerah Aliran Sungai (DAS) Sehat untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”.

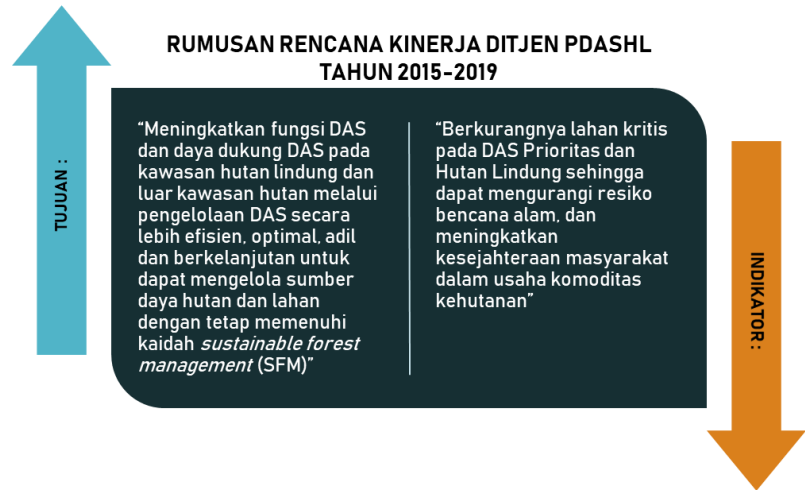
Dalam rangka pencapaian tema tersebut, didukung 6 (enam) sub tema, yaitu :

1. Memantapkan Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS;
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
3. Memantapkan Pengelolaan Hutan Lindung Tingkat Tapak;
4. Memantapkan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Perairan Darat;
5. Meningkatkan Penyediaan dan Penggunaan Benih Tanaman Hutan yang Berkualitas;

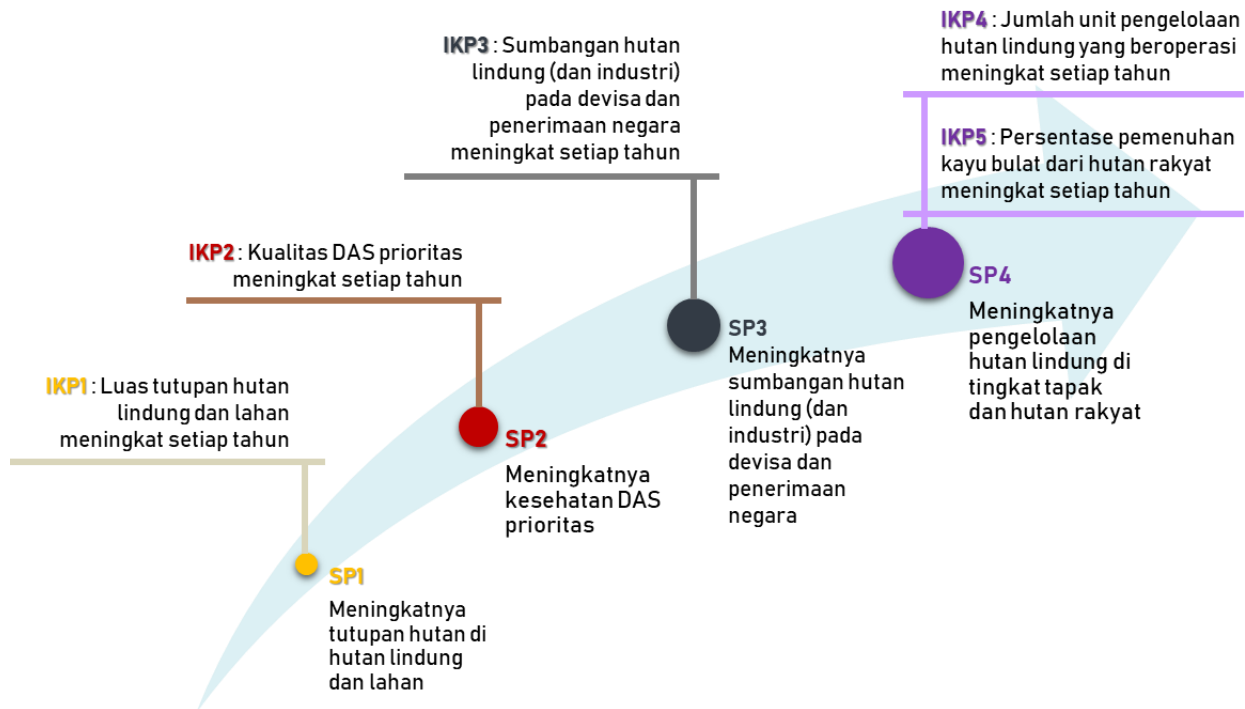
6. Memantapkan Kelembagaan Penyelenggaraan Tata Kelola Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.

B. RENCANA STRATEGIS DITJEN PDASHL TAHUN 2015–2019

Perencanaan kinerja Ditjen PDASHL didasarkan pada tujuan besar yang tertuang dalam Rencana Strategis Ditjen PDASHL tahun 2015–2019, yaitu meningkatkan fungsi DAS dan daya dukung DAS pada kawasan hutan lindung dan luar kawasan hutan melalui pengelolaan DAS secara lebih efisien, optimal, adil dan berkelanjutan untuk dapat mengelola sumber daya hutan dan lahan dengan tetap memenuhi kaidah *sustainable forest management* (SFM).



Secara hirarki, sasaran strategis yang menjadi sasaran Kementerian LHK diturunkan ke masing-masing unit Eselon I dan disebut sasaran program. Program yang terkait dengan pembangunan kehutanan di bidang PDASHL yaitu Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL). Program PDASHL Tahun 2015–2019 sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Perubahan Ditjen PDASHL Tahun 2015–2019 (Peraturan Dirjen PDASHL nomor P.2/PDASHL/SET/REN.05/2016).



SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM PDASHL TAHUN 2015-2019

Sasaran program Ditjen PDASHL kemudian diturunkan ke level di bawahnya yaitu unit Eselon II atau UPT menjadi sasaran kegiatan. Demikian seterusnya hingga ke personil di setiap unit organisasi.

Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK dan Sasaran Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun 2015-2019 dilakukan dengan mengurai langkah-langkah pencapaian kegiatan yang relevan di bawahnya sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran program dan sasaran strategis.

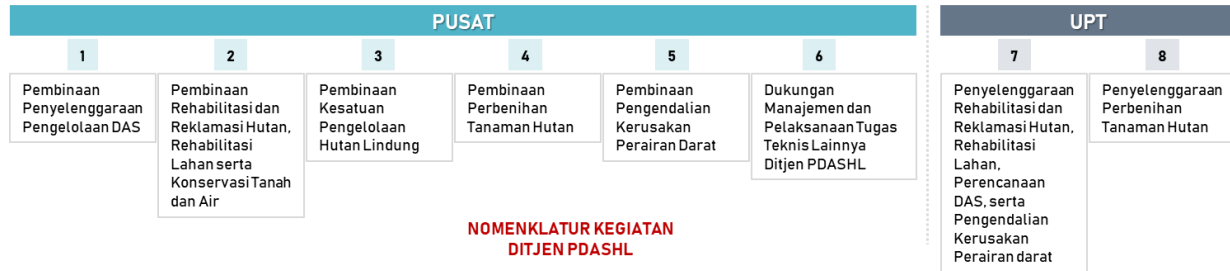
Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2 (direktorat dan setditjen di pusat) dan satuan kerja setingkat eselon 3 (UPT Ditjen PDASHL) yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang

berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam pelaksanaan Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung tahun 2018 didukung oleh 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon II (Direktorat dan Setditjen di pusat) sebanyak 6 kegiatan dan satuan kerja setingkat eselon III (UPT Ditjen PDASHL) sebanyak 2 kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat dan Setditjen bersifat pembinaan, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT bersifat penyelenggaraan.

Strategi pencapaian target-target output lingkup Ditjen PDASHL dilaksanakan dan difasilitasi baik oleh satker pusat maupun satker UPT lingkup Ditjen PDASHL. Sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi), satker pusat melaksanakan pembinaan teknis terhadap pencapaian output, penetapan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK), dan pengumpulan data dan penyajian data/informasi skala nasional, serta pelaksanaan sasaran output lingkup

nasional. Satker UPT lingkup Ditjen PDASHL melaksanakan sasaran output yang sifatnya output fisik maupun non fisik sesuai tugas masing-masing UPT.



C. RENCANA KERJA DITJEN PDASHL TAHUN 2018

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP 2018 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS), serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program yang

benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian Prioritas Nasional-Program Prioritas-Kegiatan Prioritas-Proyek Prioritas Nasional yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Turunan dari Proyek Prioritas Nasional yakni Proyek Rincian K/L menjadi indikator kinerja kegiatan (IKK).

Berbeda dengan RKP 2017, pada RKP 2018 dilakukan perampangan jumlah

program Prioritas Nasional (PN) dari sebelumnya 24 PN menjadi hanya 10 PN. Pada tahun 2017, pembangunan bidang PDASHL mendukung pada 9 PN. Pada RKP 2018, pembangunan bidang PDASHL mendukung 3 Prioritas Nasional dan 4 Program Prioritas. Kebijakan anggaran

belanja berdasarkan *money follows program* menjadikan program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas nasional merupakan indikator dalam penentuan jumlah Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga di tahun 2018.

Sebagaimana pada RKP Tahun 2018, Program yang terkait langsung dengan pembangunan bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung adalah Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PDASHLTAHUN 2018

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di hulu DAS,KPHL/Hutan Lindung, hutan mangrove, daerah tangkapan air dan sempadan danau prioritas, sempadan sungai, daerah imbuhan air tanah dan hutan kota	Luas tutupan hutan dan hasil rehabilitasi	25.300 Ha
2.	Meningkatnya kesehatan DAS prioritas	Terbangunnya bangunan Konservasi Tanah dan Air (dam pengendali, dam penahan dan <i>gully plug</i>)	3.392 Unit
3.	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak	Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat	80 KPH

Adapun prioritas dan sasaran Prioritas Nasional serta peran program dan kegiatan bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung di dalam mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.

TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM PDASHL TAHUN 2018

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	a. Jumlah sumur resapan air yang terbangun di 15 DAS prioritas	6.000 Unit	Prioritas Bidang
	b. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan	8.500 Ha	Prioritas Bidang
	- RHL DTA irigasi di KPHL/HL	6.450 Ha	
	- RHL DTA Danau	1.900 Ha	
	- RHL Imbuhan mata air	150 Ha	
	c. Bangunan KTA yang mendukung ketahanan pangan	915 Unit	Prioritas Bidang
	- DPn	215 Unit	
	- GP	700 Unit	
	d. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Rawan/Pasca Bencana secara vegetatif	16.800 Ha	Prioritas Bidang
	- RHL rawan/pasca bencana	16.250 Ha	
	- RHL sempadan sungai	50 Ha	
	- RHL mangrove	500 Ha	
	- Penanaman KBR	500 Unit	
	e. Rehabilitasi hutan dan lahan rawan/pasca bencana secara sipil teknis	2.477 Ha	Prioritas Bidang
	- DPn	477 Unit	
	- GP	2.000 Unit	
	f. Data hutan rakyat	20.000.000 M ³	Prioritas Bidang
	g. Pembinaan Forest Programme II	1 Kegiatan	Prioritas Bidang
2. Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	a. Pengembangan HHBK di hutan lindung	1.000 Ha	Prioritas Bidang
	b. Jumlah KPHL yang beroperasi	80 KPHL	Prioritas Bidang
3. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	a. RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW	80 DAS	Prioritas Bidang
	b. Data kinerja DAS	34 Provinsi	Prioritas Bidang

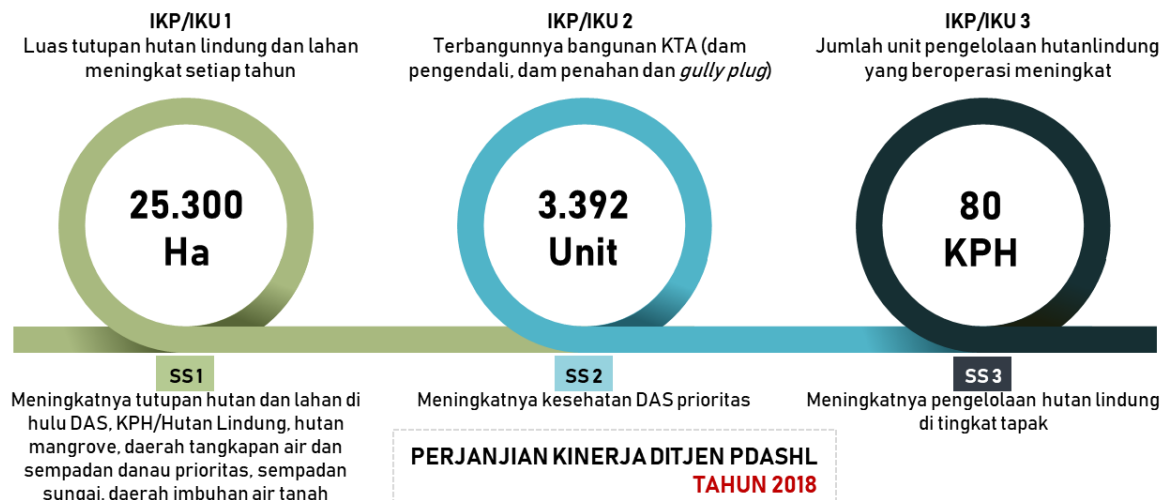
KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (2)	TARGET (3)	PRIORITAS (4)
4. Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	a. Tersediannya bibit berkualitas	50.000.000 Batang	Prioritas Bidang
	b. Tersediannya bibit produktif	2.500.000 Batang	Prioritas Bidang
	c. Kebun benih semai/kebun benih klon/areal sumber daya genetik (KBS, KBK dan ASDG)	80 Ha	Prioritas Bidang
	d. Pembuatan KBR	500 Unit	Prioritas Bidang
	e. Sumber benih terkelola - Luas sumber benih - Kultur jaringan	10.500 Ha 10.500 Ha 10 Unit	Prioritas Bidang
5. Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	a. Pemantauan kualitas air danau/sungai/mata air dan air tanah - Data kualitas air di 15 danau prioritas - Data hasil inventarisasi mata air di 15 DAS prioritas	30 Lokasi 15 Danau 15 DAS	Prioritas Bidang
	b. Tersedianya rencana pengelolaan ekosistem danau serta sarana prasarana pengelolaan ekosistem danau	15 Danau	Prioritas Bidang
	c. Inventarisasi danau	34 BPDASHL	Prioritas Bidang
	a. Jumlah sumur resapan air yang terbangun di 15 DAS prioritas	6.000 Unit	PN Perumahan dan Permukiman
	b. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan - RHL DTA irigasi di KPHL/HL - RHL DTA Danau - RHL Imbuhan mata air	8.500 Ha 6.450 Ha 1.900 Ha 150 Ha	PN Ketahanan Pangan
6. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat	c. Bangunan KTA yang mendukung ketahanan pangan - DPn - GP	915 Unit 215 Unit 700 Unit	PN Ketahanan Pangan
	d. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Rawan/Pasca Bencana secara vegetatif - RHL rawan/pasca bencana - RHL sempadan sungai - RHL mangrove - Pembuatan dan penanaman KBR	16.800 Ha 16.250 Ha 50 Ha 500 Ha 500 Unit	PN Pengembangan Wilayah
	e. Rehabilitasi hutan dan lahan rawan/pasca bencana secara sipil teknis - DPn - GP	2.477 Ha 477 Unit 2.000 Unit	PN Pengembangan Wilayah

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Data hutan rakyat	20.000.000 M ³	Prioritas Bidang
	g. Pembinaan Forest Programme II	1 Kegiatan	Prioritas Bidang
	- RHL DAS	100 Ha	
	- Agroforestry	705 Ha	
	h. Pengembangan HHBK di hutan lindung	1.000 Ha	PN Pengembangan Wilayah
	i. Jumlah KPHL yang beroperasi	80 KPHL	PN Pengembangan Wilayah
	j. RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW	80 DAS	Prioritas Bidang
	k. Data kinerja DAS	34 Provinsi	Prioritas Bidang
	l. Tersediannya bibit berkualitas	45.500.000 Batang	PN Ketahanan Pangan
	m. Tersediannya bibit produktif	2.500.000 Batang	PN Ketahanan Pangan
	n. Kebun benih semai/kebun benih klon/areal sumber daya genetik (KBS, KBK dan ASDG)	40 Ha	PN Pengembangan Wilayah
	o. Sumber benih terkelola	9.790 Ha	Prioritas Bidang
	- Luas sumber benih	9.790 Ha	
	- Kultur jaringan	8 Unit	
	p. Pemantauan kualitas air danau/sungai/mata air dan air tanah	30 Lokasi	Prioritas Bidang
	q. Tersedianya rencana pengelolaan ekosistem danau serta sarana prasarana pengelolaan ekosistem danau	15 Danau	Prioritas Bidang
	r. Inventarisasi danau	34 BPDASHL	Prioritas Bidang
7. Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan	a. Tersediannya bibit berkualitas	4.500.000 Batang	PN Ketahanan Pangan
	b. Kebun benih semai/kebun benih klon/areal sumber daya genetik (KBS, KBK dan ASDG) jaringan	40 Ha	PN Ketahanan Pangan
	c. Sumber benih terkelola	710 Ha	Prioritas Bidang
	- Luas sumber benih	710 Ha	
	- Kultur jaringan	2 Unit	
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDASHL	a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PDASHL dalam kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 76,00 poin di tahun 2018	76 Poin	Prioritas Bidang

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja Ditjen PDASHL tahun 2018 antara Direktur Jenderal PDASHL dengan Menteri LHK telah disusun dan ditandatangani pada bulan Desember tahun 2017. Untuk menjamin terlaksananya penetapan kinerja Direktur Jenderal PDASHL maka di level bawahnya juga disusun penetapan kinerja antara pimpinan Satker lingkup Ditjen PDASHL (para pejabat eselon II dengan Direktur Jenderal PDASHL dan para kepala UPT dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PDASHL).

Dalam pelaksanaan APBN TA 2018 terdapat perubahan anggaran dan fisik pada beberapa Satker. Perubahan fisik diakibatkan oleh kejadian bencana alam (Gempa bumi di Nusa Tenggara Barat dan Tsunami di Sulawesi Tengah). Sehingga beberapa kegiatan di wilayah kerja UPT Ditjen PDASHL menjadi terlambat bahkan ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan seperti RHL landscape Lore Lindu di Sulawesi Tengah (*Forest Programme III*).



“Fasilitasi penyediaan sarana prasarana wisata alam (*outbond*) menjadi aksen pengelolaan hutan di tingkat tapak secara berkelanjutan berbasis masyarakat.”

#Direktorat KPHL



03

AKUNTABILITAS KINERJA



Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan dan dilakukan secara berkala dan tahunan.

Hasil dari pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran/*outcome*.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi pengukuran kinerja sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{R_i}{R_a} \times 100\%$$

Ket: Ri (Realisasi); Ra (Rencana)

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{R_i - (R_a - R_i)}{R_a} \times 100\%$$

Ket: Ri (Realisasi); Ra (Rencana)

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%.

Terhadap hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi pencapaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi ini adalah untuk mengungkap setiap angka/persentase capaian kinerja sehingga dapat memberikan gambaran sebenarnya mengenai kegiatan dan program yang dilaksanakan. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk melihat perbedaan capaian kinerja dengan rencana/target kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah

dan akan dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat dilakukan analisis akuntabilitas kinerja lebih lanjut, seperti keterkaitan kinerja dengan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, *outcome*, *output* serta indikator-indikator kinerja. Hasil analisis dapat digunakan untuk menentukan rencana kinerja pada tahun berikutnya.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan

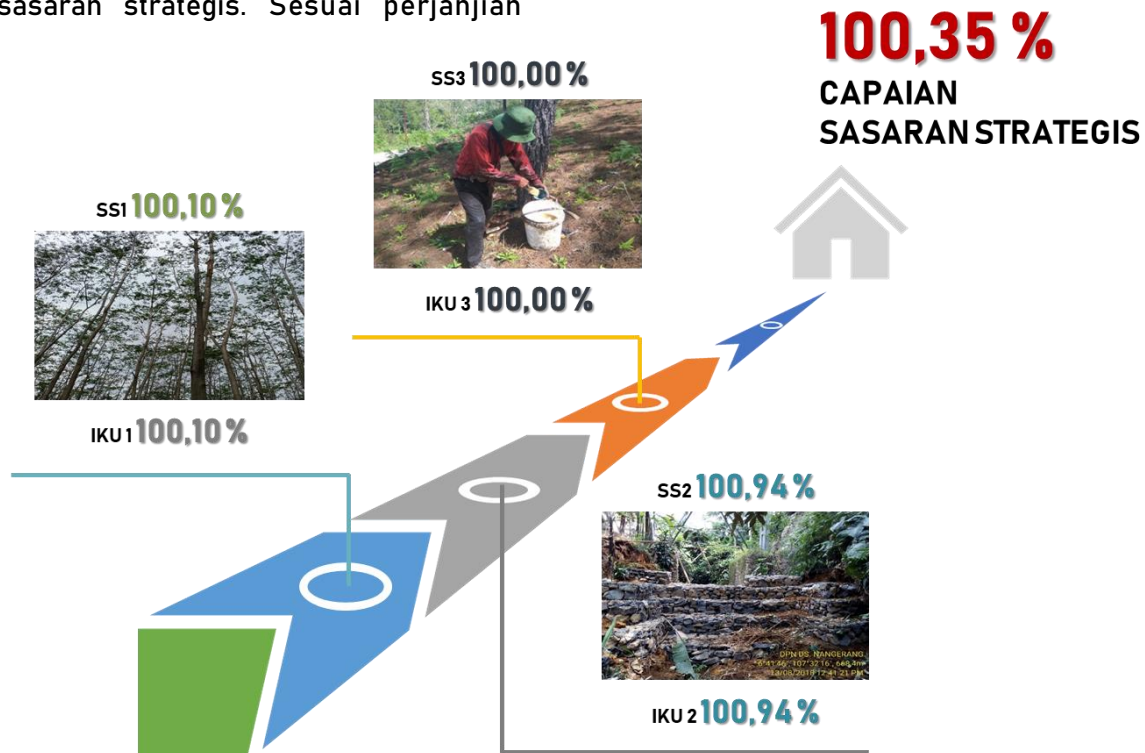
standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian kinerja serta analisis capaian kinerja yang akan disampaikan dalam laporan kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan dengan mengacu dengan anggaran yang tersedia.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal PDASHL (Program PDASHL) tahun 2018 berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU) atau indikator kinerja program yang mendukung masing-masing capaian sasaran strategis. Sesuai perjanjian

kinerja tahun 2018, kinerja Direktorat Jenderal PDASHL diperoleh dari tiga sasaran strategis/sasaran program dengan tiga IKU atau indikator kinerja program. Nilai kinerja Direktorat Jenderal PDASHL secara keseluruhan tahun 2018 adalah sebesar 100,35%.

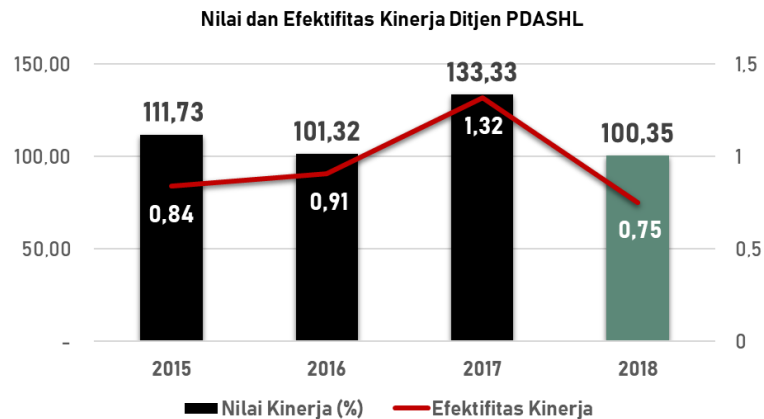


IKHTISAR KINERJA DITJEN PDASHL TAHUN 2018

Dalam pencapaian kinerja organisasi tidak lepas dari dukungan sumber daya yang tersedia. Pagu Ditjen PDASHL tahun 2018 sebesar Rp. 1.084.817.437.000,- dan terealisasi sebesar 95,44% atau sebesar Rp. 1.035.296.933.819,-. Berdasarkan pengukuran efisiensi (ratio kinerja fisik dengan kinerja keuangan), maka kinerja Ditjen PDASHL tahun 2018 termasuk ke dalam katagori efisien.



Nilai kinerja Direktorat Jenderal PDASHL tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan membandingkan pencapaian kinerja sasaran/outcome tahun ini dengan tahun sebelumnya dapat diketahui efektifitas kinerja tahun 2018 sebesar 0,75. Hal ini berarti capaian efektifitasnya juga mengalami penurunan sebesar 0,41 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Namun demikian kinerja Ditjen PDASHL tahun 2018 tetap masuk kategori sangat baik karena capaian sasaran strategis lebih dari 100%.



I. CAPAIAN KINERJA PROGRAM



SS1

Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan

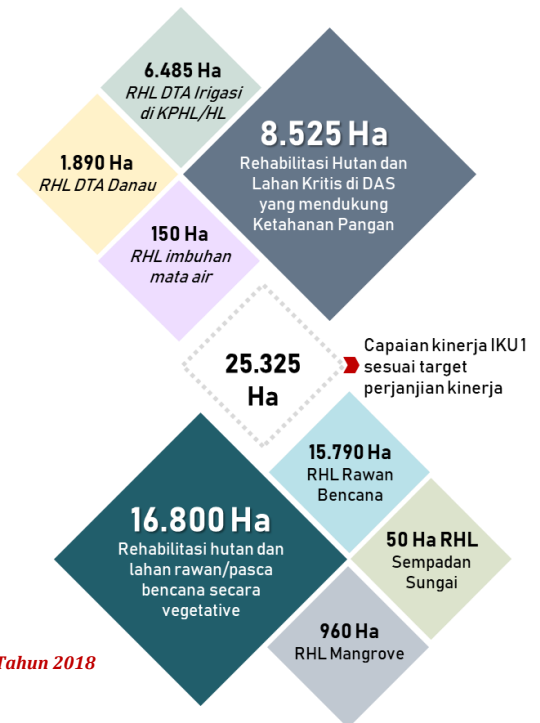
IKU 1/IKP 1

Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun

Upaya pencapaian IKU 1 dilakukan melalui rehabilitasi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Rehabilitasi di dalam kawasan hutan dengan reboisasi, sedangkan rehabilitasi di luar kawasan hutan dilaksanakan dengan pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan. Sasaran rehabilitasi hutan dan lahan adalah lahan-lahan kritis DAS Prioritas pada semua hutan (kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional) serta lahan, terutama pada bagian hulu DAS yang rawan bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, daerah tangkapan air (*catchment area*) dari waduk, bendungan dan danau, daerah resapan air (*recharge area*) di hulu DAS, daerah sempadan sungai, mata air, danau dan waduk serta bagian hilir DAS

yang rawan bencana tsunami, intrusi air laut dan abrasi pantai.

Ditjen PDASHL pada tahun 2018 telah berhasil melakukan rehabilitasi seluas 25.325 Ha. Jika dibandingkan dengan target kinerja (25.300 Ha) maka capaian kinerja untuk IKU 1 adalah sebesar 100,10%.



Jika dibandingkan dengan nilai kinerja tahun-tahun sebelumnya, kinerja IKU 1 tahun 2018 memang menurun. Kinerja yang menurun juga diikuti dengan penurunan efektifitas kinerja yaitu sebesar 0,67 jika dibandingkan dengan tahun 2017.



Dalam kontek pemenuhan capaian kinerja sesuai target perjanjian kinerja, capaian kinerja IKU 1 memang hanya dipenuhi dari kegiatan RHL Intensif saja. Untuk tahun 2018 didukung oleh RHL kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan dan RHL rawan/pasca bencana. Namun demikian dalam memenuhi sasaran program berupa meningkatkan tutupan hutan dan lahan juga didukung

oleh kinerja kegiatan lainnya yaitu penyelenggaraan RHL insentif (penanaman bibit persemaian permanen, bibit produktif dan Kebun Bibit Rakyat/KBR), pembinaan RHL serta pembinaan pengembangan perbenihan tanaman hutan.

Jika dibandingkan dengan target 5 (lima) tahun Renstra, maka proyeksi pencapaian kinerja IKU 1 untuk pencapaian SS 1 sampai dengan tahun 2018 masih memiliki selisih sangat besar. Kemampuan anggaran melalui APBN setiap tahun ternyata hanya mampu merehabilitasi hutan dan lahan kurang lebih seluas 200.000 Ha saja, sementara target Renstra selama lima tahun seluas 5,5 juta Ha.

CAPAIAN KINERJA IKU 1 TAHUN 2015-2018

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	JUMLAH
A	RHL INTENSIF (Ha)	18.853	21.195	36.984	26.130	103.162
1	DAS Prioritas/KPHL/HL	10.508	7.067	16.512	22.275	57.167
2	Mangrove	481	497	1.175	960	3.113
3	Hutan Kota	240	215	452	-	907
4	Agroforestry	7.624	13.416	15.875	-	36.915
5	DTA Danau	-	-	1.230	1.890	3.120
6	Sempadan Sungai	-	-	850	50	900
7	Imbuhan Air Tanah	-	-	890	150	1.040
8.	<i>Forest Programmell (Jambi)</i>	-	-	-	850	850
B	RHL INSENTIF (Ha)	181.594	177.151	164.006	162.500	685.251
1	Penanaman KBR	119.200	37.050	30.060	31.250	217.560
2	Penanaman bibit PP	62.394	125.400	125.579	125.000	438.373
3	Penanaman KBB KPHL / DAK	-	13.051	-	-	13.051
4	Penanaman bibit produktif	-	1.650	8.367	6.250	16.267
JUMLAH A + B		200.447	198.346	200.990	188.630	788.413

Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencapaian target IKU 1 yaitu melalui gerakan penanaman pohon baik bersumber dari dana APBD (DAK) maupun non APBN (penanaman sumber dana CSR, MoU dengan Instansi lain seperti Kemenristek, Kemendikbud, Kemenag, dan Ormas, Rehab DAS dan

reklamasi hutan, penanaman hutan tanaman industri, penanaman hutan tanaman rakyat, penanaman hutan alam serta penanaman hutan kemasyarakatan). Namun kendala yang dihadapi adalah pelaporan yang tertib dan akurat secara nasional jumlah RHL yang telah dilakukan.



**PROYEKSI CAPAIAN KINERJA SS 1 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
TERHADAP TARGET RENSTRA**

INDIKATOR	CAPAIAN S.D 2018	TARGET S.D 2019	%	STATUS
Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun	788.413 Ha	5,5 Juta Ha	14,33	Perlu upaya lebih

Dengan RHL yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2018 seluas 788.413 Ha, maka tutupan hutan juga akan meningkat. Jika dihubungkan dengan IKU Kementerian LHK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.78/Menlhk/Setjen/Set.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK, maka capaian kinerja IKU 1 Direktorat Jenderal PDASHL pada tahun 2018 dapat mendukung target IKU berupa indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5-68,5 khususnya indeks tutupan hutan.



SS 2

Meningkatnya kesehatan DAS prioritas

IKU 2/IKP 2

Terbangunnya bangunan KTA (dam pengendali, dam penahan dan gully plug)

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan DAS khususnya di DAS prioritas, selain rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk vegetatif juga dilakukan melalui pembangunan bangunan konservasi tanah dan air.

Bangunan konservasi tanah dan air berupa pembangunan dam pengendali, dam penahan, *gully plug*, sumur resapan air, dan lainnya pada 15 DAS Prioritas difokuskan pada Unit Terkecil Pengelolaan (UTP) RHL atau setingkat Sub DAS/Sub Sub DAS yang menjadi prioritas dalam RTk-RHL DAS/RP-RHL DAS, sehingga dapat diukur dengan cepat, efisien dan efektif untuk mengetahui kinerja bangunan tersebut dalam mengendalikan erosi atau sedimentasi.

Berdasarkan Renstra Ditjen PDASHL 2015-2019, target IKU 2 berupa kualitas DAS prioritas meningkat setiap tahun

sementara target IKU 2 dalam perjanjian kinerja tahun 2018 berupa terbangunnya bangunan KTA (dam pengendali, dan penahan dan *gully plug*). Perbedaan target IKU 2 tersebut sebenarnya merupakan pendetailan target kinerja dari Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) tahun 2018. Meskipun ada pendetailan target IKU 2, sasaran program yang ingin dicapai tetap sama yaitu meningkatnya kesehatan DAS prioritas.

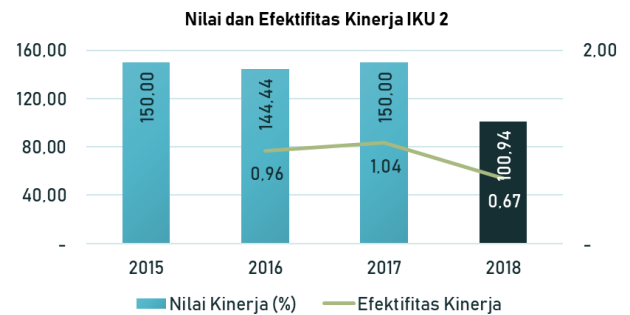
Ditjen PDASHL pada tahun 2018 telah berhasil melakukan pembangunan bangunan KTA sejumlah 3.424 Unit. Jika dibandingkan dengan target kinerja (3.392 Unit) maka capaian kinerja untuk IKU 2 adalah sebesar 100,94%.

BANGUNAN KTA

RHL Kritis Rawan/Pasca Bencana Secara Sipil Teknis		Pembuatan Bangunan KTA yang Mendukung Ketahanan Pangan		Penyediaan Sumur Resapan Air di 15 DAS Prioritas
DPn 474 Unit	GP 2.023 Unit	DPn 217 Unit	GP 710 Unit	SRA 6.000 Unit

3.424 Unit Capaian kinerja IKU 2 sesuai target perjanjian kinerja

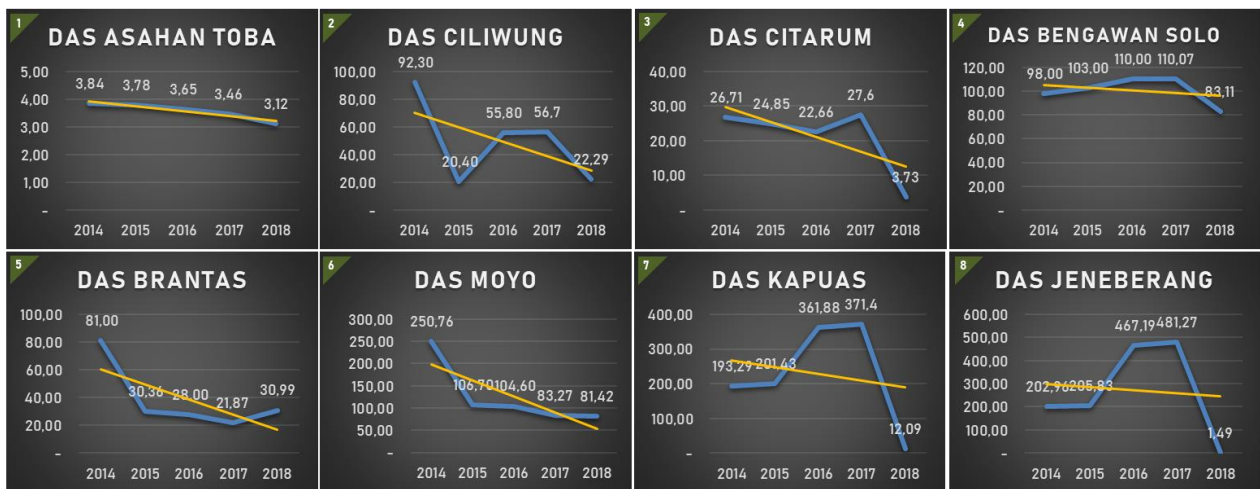
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka capaian IKU 2 tahun 2018 mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 efektifitas kinerja tahun 2018 sebesar 0,67. Namun perbandingan capaian kinerja tersebut mengabaikan satuan volume, karena untuk target kinerja tahun 2015-2016 menggunakan indikator jumlah DAS yang diintervensi sedangkan tahun 2017-2018 menggunakan jumlah unit bangunan KTA yang terbangun.



Dalam konteks pemenuhan capaian kinerja sesuai target perjanjian kinerja, capaian kinerja IKU 2 tahun 2018 hanya dipenuhi dari pembuatan bangunan KTA (dam penahan dan *gully plug*) yang mendukung RHL kritis rawan/pasca bencana secara sipil teknis dan pembuatan bangunan KTA yang mendukung ketahanan pangan. Capaian kinerja yang tidak dihitung adalah pembangunan sumur resapan air di 15 DAS prioritas yang terealisasi 100 % dari target 6.000 unit.

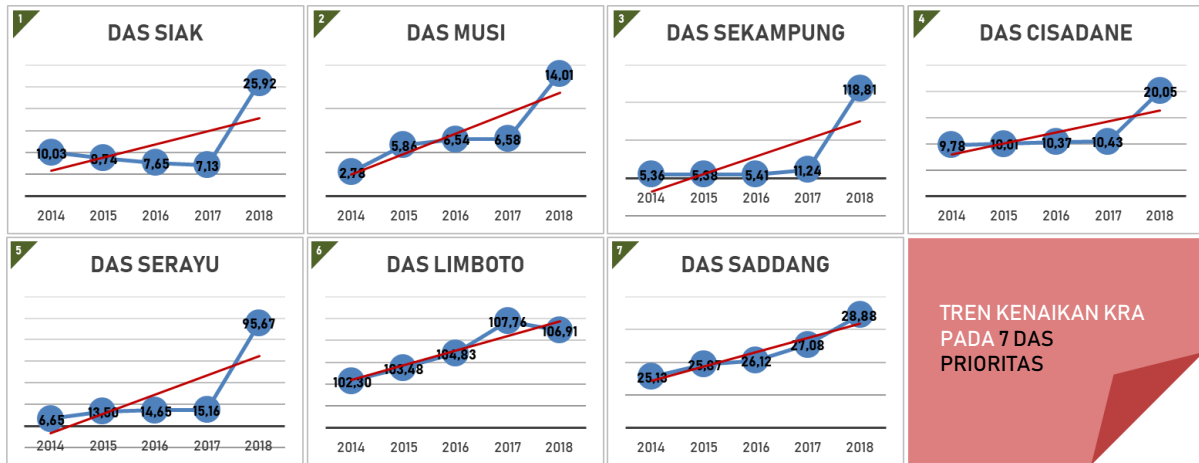
Dalam memenuhi sasaran program berupa meningkatnya kesehatan DAS prioritas selain didukung oleh kinerja IKU 2 sendiri juga didukung oleh kinerja kegiatan lainnya yaitu penyelenggaraan RHL pada IKU 1, kegiatan pemantauan kualitas air danau/sungai/mata air dan air tanah.

Untuk mengetahui pengaruh yang dilakukan terhadap peningkatan kualitas DAS di 15 DAS prioritas beberapa indikator yang dapat digunakan adalah indikator penurunan nilai $Q_{\text{mak}}/Q_{\text{min}}$ (KRA), kadar BOD atau peningkatan tutupan lahan.



TREN PENURUNAN KRA PADA 8 DAS PRIORITAS

Tren nilai KRA pada 15 DAS prioritas dari tahun 2014–2018 menunjukkan nilai yang beragam. Penurunan nilai KRA terlihat pada 8 DAS, yaitu DAS Asahan Toba, Ciliwung, Citarum, Bengawan Solo, Brantas, Moyo, Kapuas serta Jeneberang sedangkan DAS lainnya menunjukkan nilai KRA yang fluktuatif atau naik.



Meskipun besarnya nilai KRA ditentukan oleh banyak faktor, namun demikian besarnya debit maksimum dan debit minimum yang dihasilkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor curah hujan dibandingkan dengan faktor lain seperti karakteristik DAS, penggunaan lahan dan lain sebagainya.

Sebagai bahan masukan ke depan, perlu adanya indikator yang lebih pas dalam mengukur peningkatan kesehatan DAS, misalnya dengan nilai koefisien aliran permukaan atau nilai lainnya. Sehingga dengan adanya intervensi rehabilitasi hutan dan lahan baik secara vegetatif maupun pembuatan bangunan konservasi tanah akan dapat lebih mudah terlihat pengaruhnya.

Jika dibandingkan dengan target 5 (lima) tahun Renstra, maka proyeksi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2018 sudah tidak ada selisih. Intervensi RHL telah dilakukan pada 15 DAS prioritas meskipun outcome yang diharapkan tidak dapat secara langsung terlihat hasilnya. Namun adanya tren penurunan KRA pada 8 DAS prioritas memberikan gambaran bahwa intervensi RHL yang dilakukan selama ini berpengaruh terhadap peningkatan kesehatan DAS sebagaimana sasaran IKU 2 yang ingin dicapai.

Kondisi kesehatan DAS yang meningkat tentu saja mendukung pencapaian kinerja Kementerian LHK yaitu target IKU berupa indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5-68,5.



**PROYEKSI CAPAIAN KINERJA SS 2 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
TERHADAP TARGET RENSTRA**

INDIKATOR	CAPAIAN S.D 2018	TARGET S.D 2019	%	STATUS
Meningkatnya kesehatan DAS prioritas	15 DAS Prioritas	15 DAS Prioritas	100	Tercapai



SS 3

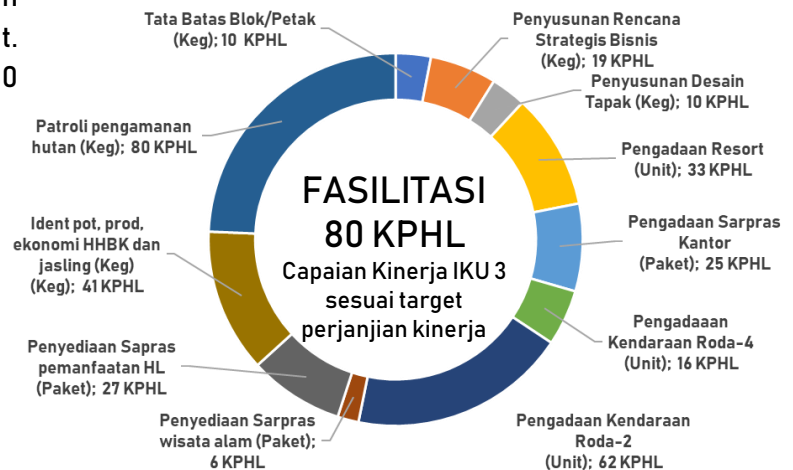
Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak

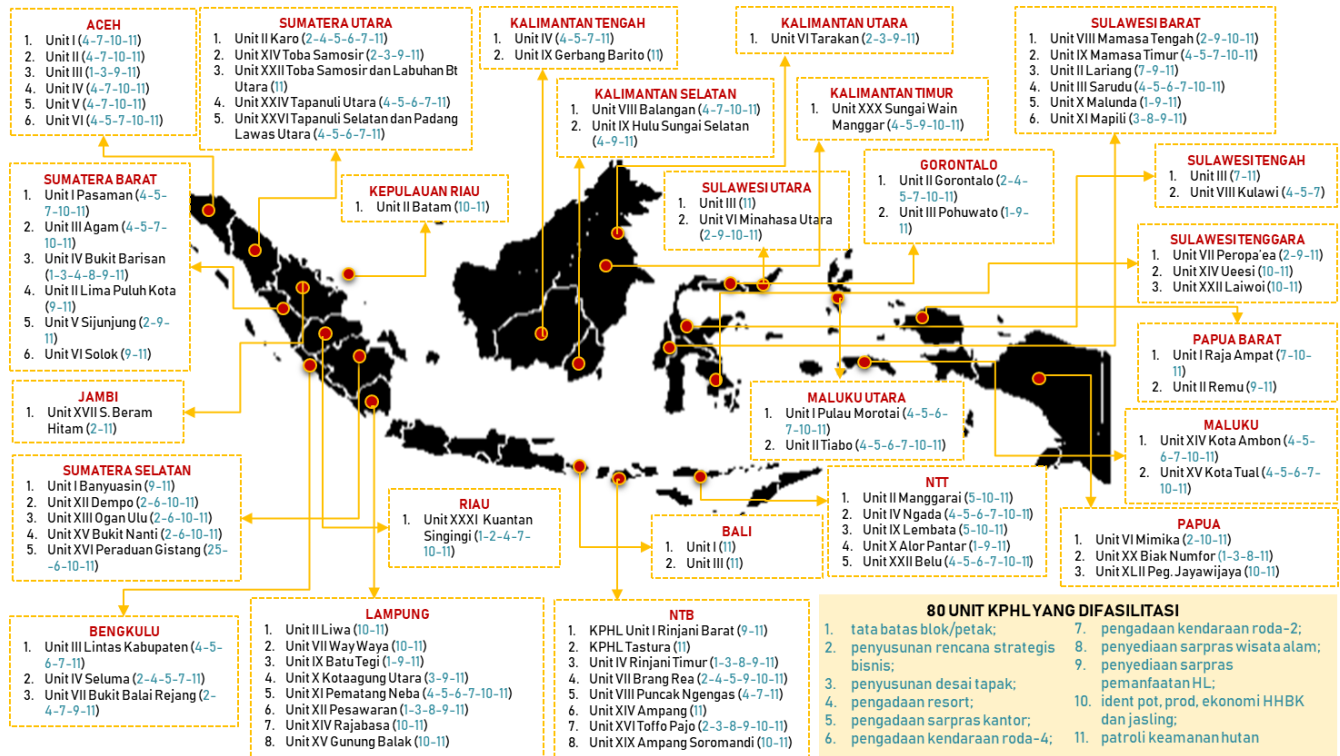
IKU 3/IKP 3

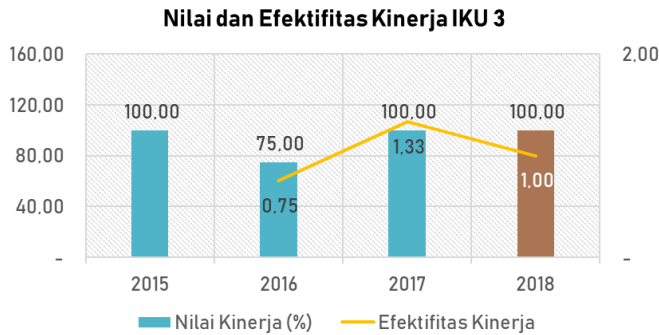
Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat

KPHL dapat dikategorikan beroperasi apabila telah memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu unit KPHL telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP), telah berlembaga dan telah tersedia sumber daya manusia. Berdasarkan persyaratan tersebut maka KPHL yang masuk kategori beroperasi sampai dengan tahun 2018 adalah sejumlah 80 Unit. Sehingga capaian IKU.3 dari target 80 Unit dapat terealisasi sebesar 100,00%.

Dalam upaya mendorong operasionalisasi KPHL tersebut, berbagai fasilitasi telah diberikan mulai dari aspek perencanaan, sarana dan prasarana, pengelolaan hutan serta pembiayaan bakti rimbawan.







Jika dibandingkan dengan target 5 (lima) tahun Renstra, maka proyeksi pencapaian kinerja IKU 3 untuk pencapaian SS 3 sampai dengan tahun 2018 masih memiliki selisih sangat besar. Sampai dengan tahun 2018 jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 80 KPHL, artinya baru terealisasi sebesar 43,96% dari target renstra.

Nilai kinerja IKU 3 tahun 2018 tetap jika dibandingkan dengan tahun 2017, tetapi nilai efektifitas kinerjanya menurun sebesar 0,33. Penurunan efektifitas kinerja tidak disebabkan oleh capaian kinerja tahun 2018 tetapi lebih diakibatkan oleh capaian kinerja tahun 2016 yang sangat rendah dan menjadikan efektifitas kinerja tahun 2017 menjadi sangat tinggi.



**PROYEKSI CAPAIAN KINERJA SS 3 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
TERHADAP TARGET RENSTRA**

INDIKATOR	CAPAIAN S.D 2018	TARGET S.D 2019	%	STATUS
Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak	80 Unit KPHL	182 Unit KPHL	43,96	Perlu upaya lebih

Salah satu kendala tidak tercapainya target adalah adanya proses pengalihan kewenangan dari SKPD/UPTD Kabupaten/Kota menjadi UPT Dinas Kehutanan Provinsi sesuai UU nomor 23 tahun 2014. Bahkan di tahun 2018 dilakukan penyesuaian pembentukan kelembagaan oleh Pemerintah Daerah.

Upaya-upaya pencapaian target telah dilakukan di masing-masing unit kerja baik UPT Ditjen PDASHL, Dinas Kehutanan Provinsi maupun KPHL sendiri sesuai dengan tugas masing-masing. UPT Ditjen PDASHL berperan untuk melakukan intervensi kegiatan ke KPHL, melakukan koordinasi dengan Kepala KPH terkait inventarisasi/identifikasi potensi dan masalah SDA/SDH, proaktif dalam penyusunan RPHJP

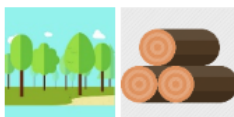
serta mengarahkan kegiatan non APBN ke areal KPHL. Dinas Kehutanan Provinsi berperan untuk mendorong Gubernur menetapkan struktur organisasi KPHL sebagai tindak lanjut UU nomor 23 tahun 2014 serta mengalokasikan anggaran APBD/Dekonsentrasi/DAK/DBH SDH DR. KPHL berperan untuk melakukan inventarisasi/identifikasi potensi dan masalah SDA/SDH, menyusun RPHJP dan perencanaan turunannya, mengusulkan kegiatan dan anggaran setiap tahun kepada Kepala UPT Ditjen PDASHL sesuai RPHJP dan RPHJPD serta menyusun rencana strategis bisnis dan rencana bisnis atas komoditas.

Selain tiga capaian IKU program di atas, Ditjen PDASHL juga memiliki capaian IKU yang tidak menjadi target dalam perjanjian kinerja di tahun 2018, yaitu IKU berupa sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun dan IKU persentase pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat meningkat setiap tahun.

Untuk capaian IKU berupa sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun, pada tahun 2018 tidak dapat diukur karena tidak adanya target pada dokumen perjanjian kinerja. Proyeksi capaian selama empat tahun juga tidak dapat diakumulasikan karena satuan volume target setiap tahun berbeda bahkan tidak menjadi IKU dalam perjanjian kinerja. Capaian tahun 2015 didukung oleh kegiatan penyelenggaraan persuteraan alam berupa persentase produksi HHBK sutera alam dari hutan lindung, yaitu peningkatan produksi kokon dan benang sebesar 3% (100%). Tahun 2016 terjadi perubahan satuan volume target dari persen menjadi rupiah, hal ini

dikarenakan adanya penataan kelembagaan UPT Ditjen PDASHL (dihilangkannya Balai Persuteraan Alam). Capaian tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 5,001 Miliar (22,13%). Untuk tahun 2017 kondisinya sama dengan tahun 2018, yaitu tidak dapat diukur karena tidak adanya target pada dokumen perjanjian kinerja.

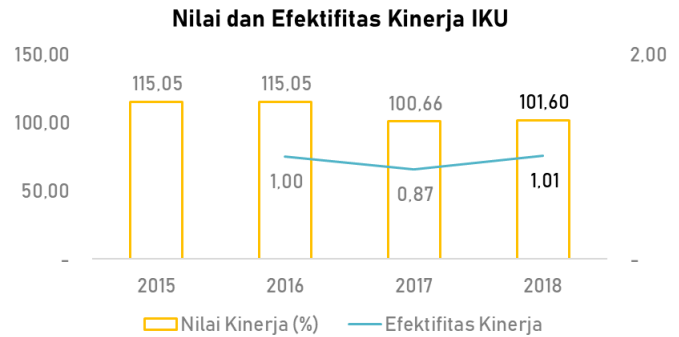
Untuk capaian IKU persentase pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat meningkat setiap tahun diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi *standing stock* hutan rakyat hasil tanaman bibit KBR yang telah berumur minimal 5 tahun. Realisasi pada tahun 2018 sebesar 100,66 % dari target 20 juta M³.



Potensi Produksi Kayu Hutan Rakyat

No	Provinsi	Volume <i>Standing Stock</i> (M ³)			
		2015	2016	2017	2018
1	Bali	767.250	1.034.781	760.000	500.000
2	Banten	240.123	52.009	72.000	500.000
3	Bengkulu	111.794	127.508	100.000	100.000
4	DI Aceh	196.662	1.052.018	196.000	100.000
5	DI Yogyakarta	553.977	1.631.880	2.500.000	2.000.000
6	DKI Jakarta	-	-	-	-
7	Gorontalo	72.230	850	75.000	175.000
8	Jambi	58.500	127.934	60.000	100.000
9	Jawa Barat	325.869	53.959	443.000	3.000.000
10	Jawa Tengah	6.804.699	6.377.443	2.100.000	3.500.000
11	Jawa Timur	5.568.501	5.923.986	8.300.000	2.500.000
12	Kalimantan Barat	303.316	163.658	300.000	300.000
13	Kalimantan Selatan	28.136	113.758	28.000	350.000
14	Kalimantan Tengah	86.387	9.322	35.000	350.000
15	Kalimantan Timur	34.650	7	87.000	250.000
16	Kalimantan Utara	-	-	-	-
17	Kep. Bangka Belitung	53.847	161.861	55.000	55.000
18	Kep. Riau	53.723	13.626	55.000	55.000
19	Lampung	74.227	127.232	100.000	1.500.000
20	Maluku	106.110	80.747	100.000	100.000
21	Maluku Utara	56.250	-	57.000	100.000
22	Nusa Tenggara Barat	308.707	1.717.984	350.000	350.000
23	Nusa Tenggara Timur	1.322.775	585.110	1.000.000	500.000
24	Papua	36.115	177.070	36.000	200.000
25	Papua Barat	63.000	-	63.000	150.000
26	Riau	125.388	5.021	225.000	225.000
27	Sulawesi Barat	50.045	872	50.000	150.000
28	Sulawesi Selatan	721.663	643.021	725.000	1.500.000
29	Sulawesi Tengah	39.366	-	40.000	150.000
30	Sulawesi Tenggara	1.134.000	28.006	900.000	500.000
31	Sulawesi Utara	356.913	622.232	360.000	200.000
32	Sumatera Barat	158.168	103.872	60.000	60.000
33	Sumatera Selatan	292.248	-	300.000	300.000
34	Sumatera Utara	676.165	2.073.810	700.000	500.000
Jumlah		23.009.579	23.009.579	20.132.000	20.320.000

Nilai dan efektifitas kinerja IKU pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat meningkat setiap tahun pada tahun 2018 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017.



Jika dibandingkan dengan target 5 (lima) tahun Renstra, maka proyeksi pencapaian IKU pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat meningkat setiap tahun sampai dengan tahun 2018 optimis dapat tercapai. Sampai dengan tahun 2018 potensi pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat sebesar 86.471.158 M³, artinya sudah terealisasi sebesar 86,47 % dari target renstra.

<div>  PROYEKSI CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 TERHADAP TARGET RENSTRA </div>				
INDIKATOR	CAPAIAN S.D 2018	TARGET S.D 2019	%	STATUS
Pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat meningkat setiap tahun	86.471.158 M ³	100.000.000 M ³	86.47	Optimis Tercapai

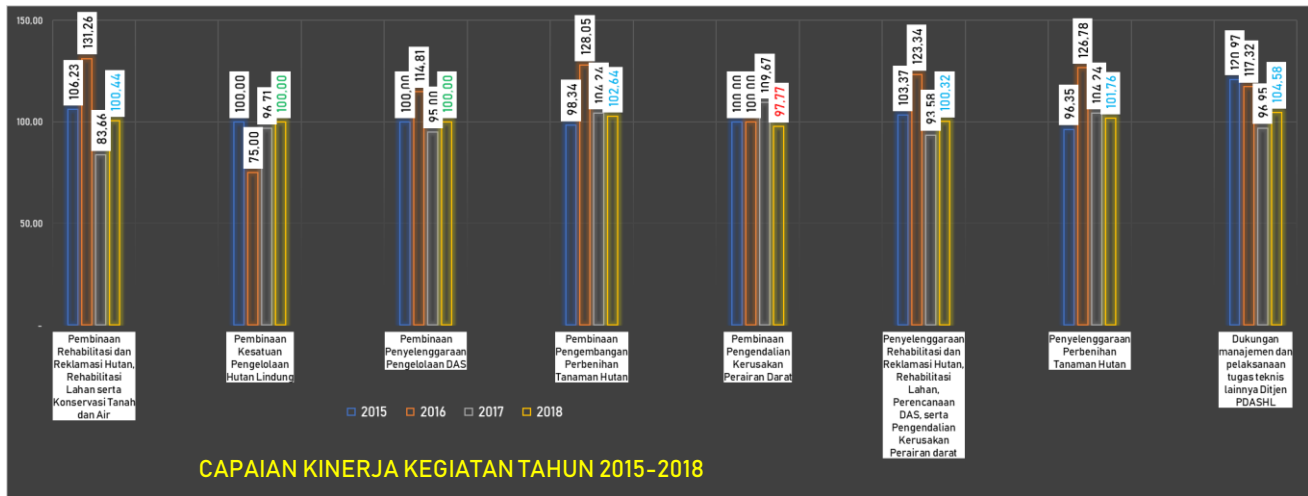
II. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Di samping penetapan indikator kinerja utama/program, telah ditetapkan pula indikator kinerja kegiatan (IKK) yang juga termuat dalam penetapan kinerja para pejabat eselon II lingkup Ditjen PDASHL dan para kepala UPT lingkup Ditjen PDASHL.

Dari delapan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2018 untuk mendukung program PDASHL, sebanyak lima kegiatan yang memiliki capaian kinerja lebih dari 100% yaitu pembinaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air (100,44%), pembinaan pengembangan perbenihan tanaman hutan (102,64%), penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan DAS, serta pengendalian kerusakan perairan darat (100,32%), penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan (101,76%) serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Ditjen PDASHL (104,58%). Sedangkan dua kegiatan lainnya memiliki capaian kinerja sebesar 100% dan satu kegiatan memiliki capaian kurang dari 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, terdapat lima kegiatan di tahun 2018 yang memiliki nilai kinerja meningkat yaitu pembinaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS, penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan DAS, serta pengendalian kerusakan perairan darat serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDASHL. Sedangkan tiga kegiatan lainnya memiliki capaian kinerja menurun.



Dari delapan kegiatan terdapat sebanyak 41 IKK yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan. Sebanyak 14 IKK dengan capaian > 100%, 23 KK dengan capaian 100% dan 4 IKK kurang dari 100%.

■ IKK < 100 % ■ IKK = 100 % ■ IKK > 100 %

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DITJEN PDASHL TAHUN 2018

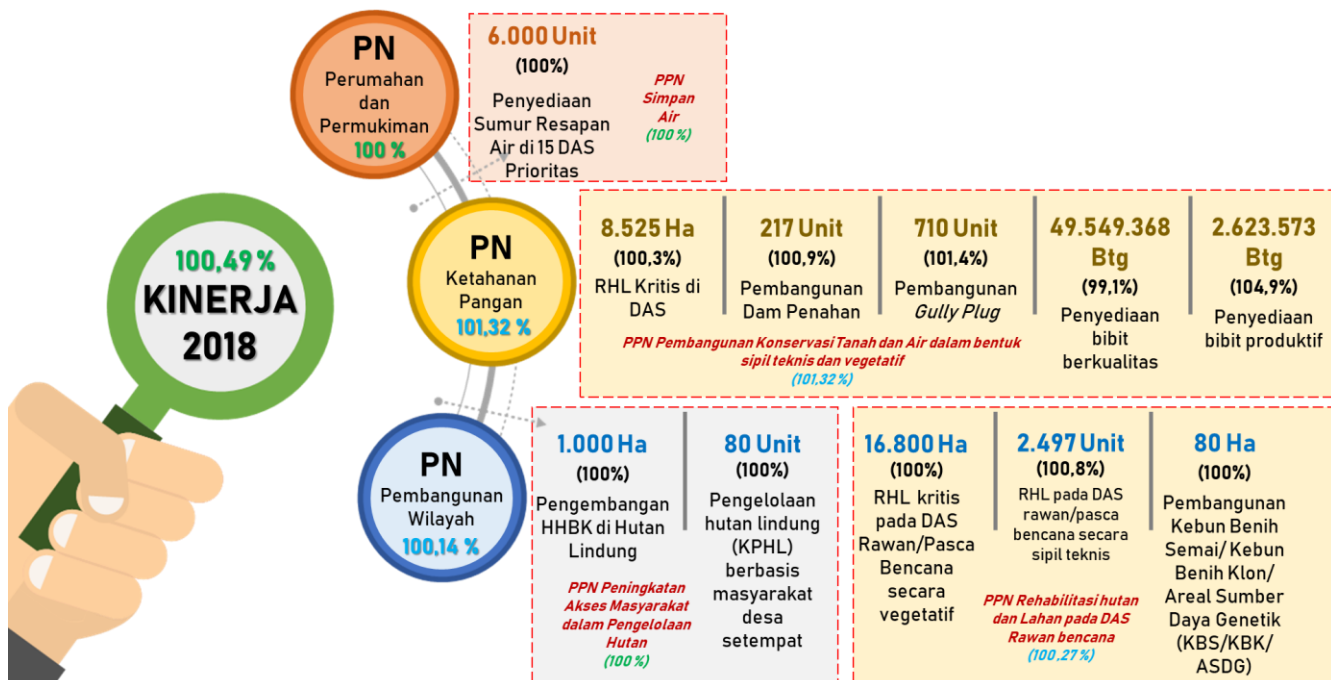
KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	a. Jumlah sumur resapan air yang terbangun di 15 DAS prioritas	6.000 Unit	6.000 Unit	100,00
	b. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan	8.500 Ha	8.525 Ha	100,29
	- RHL DTA irigasi di KPHL/HL	6.450 Ha	6.485 Ha	100,54
	- RHL DTA Danau	1.900 Ha	1.890 Ha	99,47
	- RHL Imbuhan mata air	150 Ha	150 Ha	100,00
	c. Bangunan KTA yang mendukung ketahanan pangan	915 Unit	927 Unit	101,31
	- DPn	215 Unit	217 Unit	100,93
	- GP	700 Unit	710 Unit	101,43
	d. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Rawan/Pasca Bencana secara vegetatif	16.800 Ha	16.800 Unit	100,00
	- RHL rawan/pasca bencana	16.250 Ha	15.790 Ha	97,17
	- RHL sempadan sungai	50 Ha	50 Ha	100,00
	- RHL mangrove	500 Ha	960 Ha	192,00
	- Penanaman KBR	500 Unit	521 Unit	104,20
2. Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	e. Rehabilitasi hutan dan lahan rawan/pasca bencana secara sipil teknis	2.477 Ha	2.497 Ha	100,81
	- DPn	477 Unit	474 Unit	99,37
	- GP	2.000 Unit	2.023 Unit	101,15
	f. Data hutan rakyat	20.000.000 M ³	20.132.000 M ³	100,66
	g. Pembinaan Forest Programme II	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
3. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	a. Pengembangan HHBK di hutan lindung	1.000 Ha	1.000 Ha	100,00
	b. Jumlah KPHL yang beroperasi	80 KPHL	80 KPHL	100,00
4. Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	a. RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW	80 DAS	80 DAS	100,00
	b. Data kinerja DAS	34 Provinsi	34 Provinsi	100,00
5. Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	a. Tersediannya bibit berkualitas	50.000.000 Batang	49.549.368 Batang	99,09
	b. Tersediannya bibit produktif	2.500.000 Batang	2.623.573 Batang	104,94

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c. Kebun benih semai/kebun benih klon/areal sumber daya genetik (KBS, KBK dan ASDG)	80 Ha	80 Ha	100,00
	d. Pembuatan KBR	500 Unit	519 Unit	103,80
	e. Sumber benih terkelola	10.500 Ha	11.063 Ha	105,36
	- Luas sumber benih	10.500 Ha	11.063 Ha	105,36
	- Kultur jaringan	10 Unit	10 Unit	100,00
5. Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	a. Pemantauan kualitas air danau/sungai/mata air dan air tanah	30 Lokasi	28 Lokasi	93,33
	- Data kualitas air di 15 danau prioritas	15 Danau	14 Danau	93,33
	- Data hasil inventarisasi mata air di 15 DAS prioritas	15 DAS	14 DAS	93,33
	b. Tersedianya rencana pengelolaan ekosistem danau serta sarana prasarana pengelolaan ekosistem danau	15 Danau	15 Danau	100,00
	c. Inventarisasi danau	34 BPDASHL	34 BPDASHL	100,00
6. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan darat	a. Jumlah sumur resapan air yang terbangun di 15 DAS prioritas	6.000 Unit	6.000 Unit	100,00
	b. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan	8.500 Ha	8.525 Ha	100,29
	- RHL DTA irigasi di KPHL/HL	6.450 Ha	6.485 Ha	100,54
	- RHL DTA Danau	1.900 Ha	1.890 Ha	99,47
	- RHL Imbuan mata air	150 Ha	150 Ha	100,00
	c. Bangunan KTA yang mendukung ketahanan pangan	915 Unit	927 Unit	101,31
	- DPn	215 Unit	217 Unit	100,93
	- GP	700 Unit	710 Unit	101,43
	d. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Rawan/Pasca Bencana secara vegetatif	16.800 Ha	16.800 Unit	100,00
	- RHL rawan/pasca bencana	16.250 Ha	15.790 Ha	97,17
	- RHL sempadan sungai	50 Ha	50 Ha	100,00
	- RHL mangrove	500 Ha	960 Ha	192,00
	- Pembuatan dan penanaman KBR	500 Unit	521 Unit	104,20
	e. Rehabilitasi hutan dan lahan rawan/pasca bencana secara sipil teknis	2.477 Ha	2.497 Ha	100,81
	- DPn	477 Unit	474 Unit	99,37
	- GP	2.000 Unit	2.023 Unit	101,15
	f. Data hutan rakyat	20.000.000 M ³	20.132.000 M ³	100,66

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	g. Pembinaan Forest Programme II	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
	- RHL DAS	100 Ha	100 Ha	100,00
	- Agroforestry	705 Ha	705 Ha	100,00
	h. Pengembangan HHBK di hutan lindung	1.000 Ha	1.000 Ha	100,00
	i. Jumlah KPHL yang beroperasi	80 KPHL	80 KPHL	100,00
	j. RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW	80 DAS	80 DAS	100,00
	k. Data kinerja DAS	34 Provinsi	34 Provinsi	100,00
	l. Tersediannya bibit berkualitas	45.500.000	45.046.700	99,00
		Batang	Batang	
	m. Tersediannya bibit produktif	2.500.000	2.623.573	104,94
		Batang	Batang	
	n. Kebun benih semai/kebun benih klon/areal sumber daya genetik (KBS, KBK dan ASDG)	40 Ha	40 Ha	100,00
	o. Sumber benih terkelola	9.790 Ha	10.316 Ha	105,37
	- Luas sumber benih	9.790 Ha	10.316 Ha	105,37
	- Kultur jaringan	8 Unit	8 Unit	100,00
	p. Pemantauan kualitas air danau/sungai/mata air dan air tanah	30 Lokasi	28 Lokasi	93,33
	q. Tersedianya rencana pengelolaan ekosistem danau serta sarana prasarana pengelolaan ekosistem danau	15 Danau	15 Danau	100,00
	r. Inventarisasi danau	34 BPDASHL	34 BPDASHL	100,00
7. Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan	a. Tersediannya bibit berkualitas	4.500.000	4.502.668	100,06
		Batang	Batang	
	b. Kebun benih semai/kebun benih klon/areal sumber daya genetik (KBS, KBK dan ASDG) jaringan	40 Ha	40 Ha	100,00
	c. Sumber benih terkelola	710 Ha	747 Ha	105,21
	- Luas sumber benih	710 Ha	747 Ha	105,21
	- Kultur jaringan	2 Unit	2 Unit	100,00
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDASHL	a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PDASHL dalam kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 76,00 poin di tahun 2018	76 Poin	79,48 Poin	104,58

III. CAPAIAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, kegiatan pembangunan bidang PDASHL mendukung 3 Prioritas Nasional (PN) dan 4 Proyek Prioritas Nasional (PPN). Kinerja kegiatan pembangunan bidang PDASHL mendukung Prioritas Nasional sebesar 100,49 %, terdiri dari kinerja PN perumahan dan permukiman sebesar 100 %, kinerja PN ketahanan pangan sebesar 101,32 % dan PN pembangunan wilayah sebesar 100,14 %.

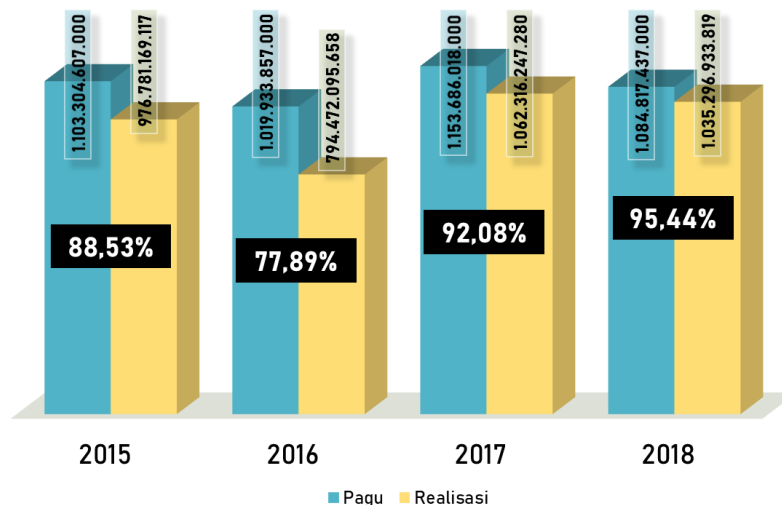


B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran awal Ditjen PDASHL tahun 2018 untuk pelaksanaan Program PDASHL yang bersumber dari DIPA BA 29 TA 2018 adalah sebesar Rp. 1.082.474.152.000,-. Namun demikian pada tahun berjalan terjadi penambahan anggaran yang bersumber dari dana hibah luar negeri sehingga pagu berubah menjadi Rp. 1.084.817.437.000,-. Realisasi anggaran Ditjen PDASHL tahun 2018 sebesar Rp.

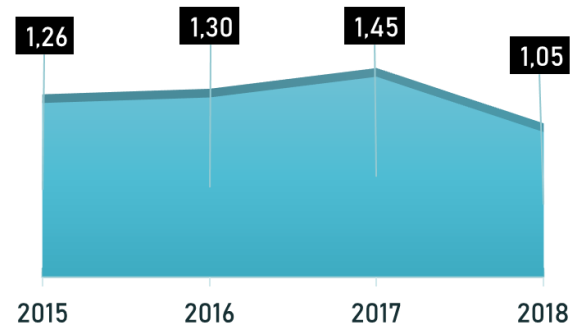
1.035.296.933.819,- atau sebesar 95,44 %.

Jika dibandingkan dengan capaian pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya, maka kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2018 merupakan realisasi yang tertinggi dari aspek pelaksanaannya, meskipun dari aspek alokasi anggaran menurun jika dibandingkan tahun 2017.

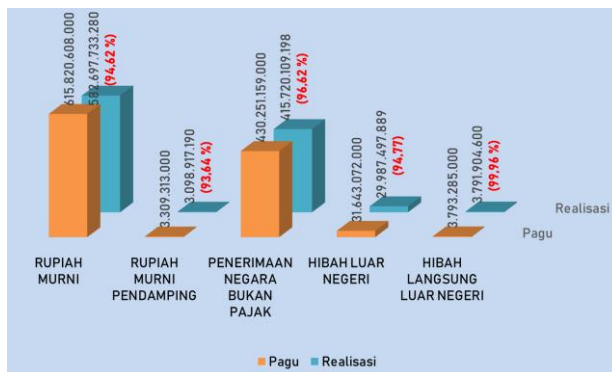


REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2015-2018

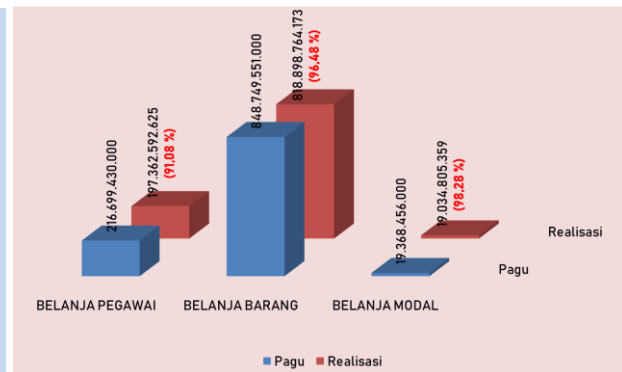
Efisiensi (ratio kinerja fisik dengan kinerja keuangan) Ditjen PDASHL tahun 2018 memang menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun efisiensi tahun 2018 masih masuk dalam katagori efisien dengan nilai sebesar 1,05.



EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2015-2018



REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DITJEN PDASHL PER SUMBER DANA TAHUN 2018

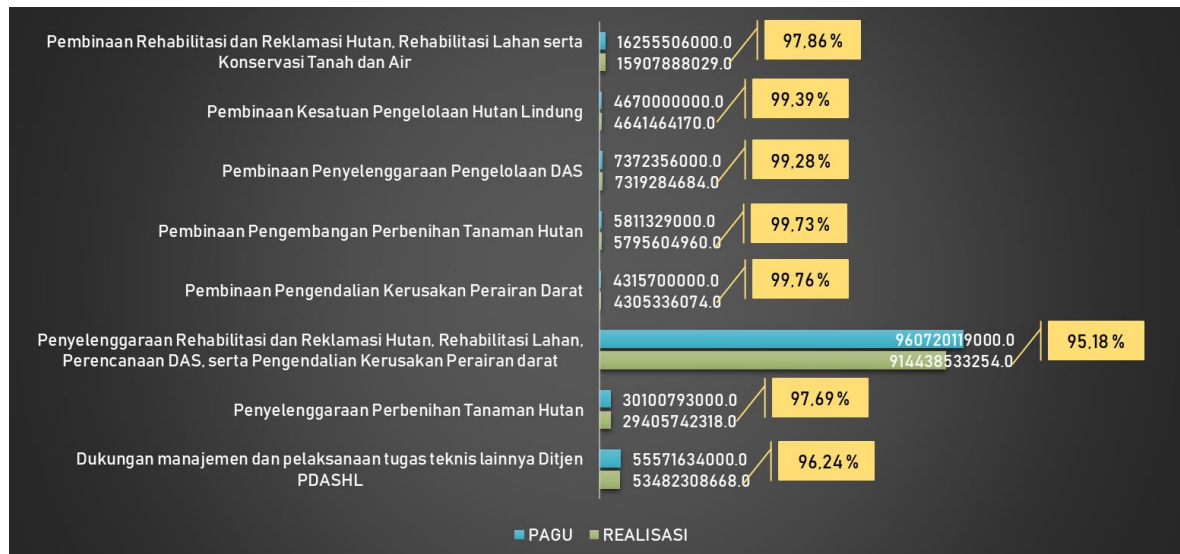


REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DITJEN PDASHL PER JENIS BELANJA TAHUN 2018

Jika dilihat dari postur anggaran tahun 2018, maka persentase realisasi anggaran tertinggi berasal dari sumber dana hibah langsung luar negeri sebesar 99,96 % dan jenis belanja modal sebesar 98,28 %. Meskipun bobot anggaran terbesar berasal dari rupiah murni dan belanja barang.

Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.084.817.437.000,- dialokasikan untuk 8 (delapan) kegiatan pokok Ditjen PDASHL tahun 2018. Dari delapan kegiatan tersebut, kegiatan pembinaan pengendalian kerusakan perairan darat memiliki realisasi anggaran tertinggi

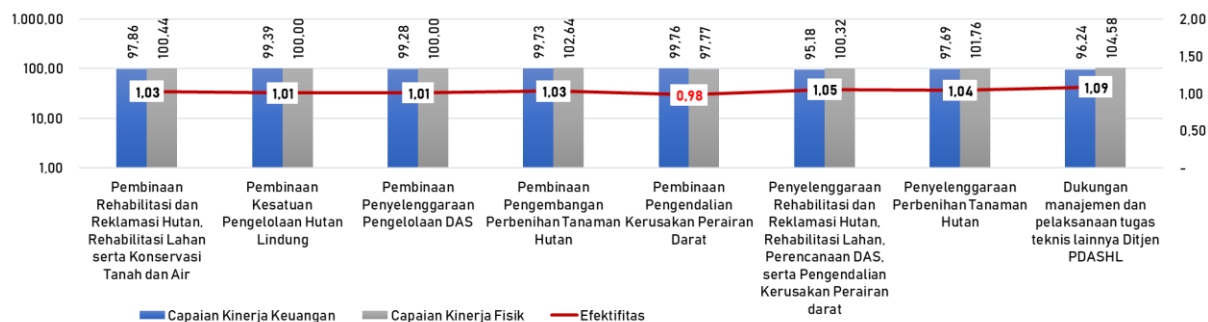
yaitu sebesar 99,76 % dan kegiatan yang memiliki realisasi anggaran terkecil adalah penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan DAS, serta pengendalian kerusakan perairan darat sebesar 95,18%.



REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN LINGKUP DITJEN PDASHL TAHUN 2018

Dengan membandingkan pencapaian kinerja fisik dengan realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2018 per kegiatan, maka dapat diperoleh informasi efisiensi penggunaan sumber daya pada level kegiatan.

EFISIENSI ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN 2018



Dari delapan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak tujuh kegiatan masuk kategori efisien, dan hanya kegiatan pembinaan pengendalian kerusakan perairan darat saja yang kurang efisiensi dengan nilai sebesar 0,98. Kurang efisiennya kegiatan pembinaan pengendalian kerusakan perairan darat sebenarnya disebabkan adanya revisi anggaran di UPT yang sebelumnya dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan bidang pengendalian kerusakan perairan darat menjadi kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta rehabilitasi lahan khususnya untuk penyusunan rancangan RHL (T-1). Di sisi lain perubahan target fisik saat pelaksanaan kegiatan tidak diiringi dengan perubahan perjanjian kinerja kegiatan pembinaan pengendalian kerusakan perairan darat. Sehingga menyebabkan kinerja fisik secara pelaporan tidak maksimal.

“Menghijau di atas hamparan putih
(bekas tambang liar);
Hasil reboisasi insentif di Desa
Belilik Kecamatan Namang Kota
Bangka Tengah”

Bagian Program dan Evaluasi
Setditjen PDASHL





04

PENUTUP

Laporan kinerja Ditjen PDASHL tahun 2018 disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.

Akuntabilitas kinerja Ditjen PDASHL tahun 2018 diukur berdasarkan penetapan ukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja fisik Ditjen PDASHL secara keseluruhan tahun 2018 adalah sebesar 100,35%. Kinerja tersebut didasarkan pada pencapaian 3 (tiga) sasaran program (SP) yang diukur dari pencapaian target pada 3 (tiga) indikator kinerja program (IKP) yang sekaligus merupakan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2018, terdiri dari :

1. Luas tutupan hutan dan hasil rehabilitasi terealisasi sebesar 100,10 %;
2. Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air (dam pengendali, dam penahan dan gully plug) terealisasi sebesar 100,94 %;
3. Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat terealisasi sebesar 100,00 %.

Dalam pencapaian kinerja organisasi tidak lepas dari dukungan sumber daya yang tersedia. Pagu Ditjen PDASHL tahun 2018 sebesar Rp. 1.084.817.437.000,- dan terealisasi sebesar 95,44% atau sebesar Rp. 1.035.296.933.819,-. Berdasarkan pengukuran efisiensi (ratio kinerja fisik dengan kinerja keuangan), diperoleh nilai sebesar 1,05 yang dapat menggambarkan kinerja Ditjen PDASHL tahun 2018 berjalan efisien.

Salah satu upaya perbaikan kinerja ke depan, Ditjen PDASHL telah membuat *corrective action* untuk kegiatan RHL tahun 2019 yang memiliki target hampir sepuluh kali lipat dibandingkan target tahun-tahun sebelumnya. *Corrective action* yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta perubahan regulasi.

Pada akhirnya disadari bahwa suksesnya kegiatan pembangunan kehutanan di Indonesia khususnya bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung tergantung pada para pihak yang terlibat yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama yang baik serta komitmen yang kuat dari semua pihak dibutuhkan dan menjadi modal utama untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Ditjen PDASH



CERITA SUKSES

PANEN GETAH PINUS KPHL MAMASA TENGAH

Perjanjian kerjasama dalam pemungutan HHBK telah ada di beberapa KPHL. Bahkan sebelum terbitnya Permenlhk nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada KPH (kategori BUMN/BUMSI) telah ada kerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan HHBK di beberapa KPHL seperti KPHL Mapili di Sulbar, KPHL Sungai Wain Manggar di Kaltim, KPHL Tarakan di Kaltara, KPHL Rinjani Barat di NTB serta KPHL Bukit Barisan di Sulbar.

Hutan pinus di KPHL Mapili merupakan cerminan keberhasilan reboisasi yang dilaksanakan di tahun 1990.

KPHL Mamasa Tengah merupakan salah satu KPHL yang sudah memiliki perjanjian kerjasama setelah terbitnya Permenlhk nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017. Pemungutan getah pinus dari lahan seluas 4.000 Ha mampu memproduksi getah sebanyak **2.270 ton/th**.

Selain produksi getah pinus, potensi HHBK lainnya berupa rotan tohiti 200 ton/th, rotan batang 1.000 ton/th, kopi 250 ton/th, pakis 2 ton/bulan. Potensi jasa lingkungan berupa air terjun solokan, air terjun liawan dan goa kelelawar.



TESTIMONI



TANAMAN JENGKOL DARI BIBIT PERSEMAIAN PERMANEN

TESTIMONI :

Ahmadi salah satu ketua kelompok tani di Desa Nusapati Kecamatan Sui Pinyuh Kabupaten Mempawah, mengungkapkan kegirangannya :

"Tanaman jengkol yang dahulu saya peroleh dari pembagian bibit gratis Persemaian Permanen BPDASHL Kapuas sejak tahun 2013 sudah panen 2 kali. Dari 80 pohon yang berbuah menghasilkan produksi sebanyak 2 Ton. Setiap panen buah jengkol laku sampai 16 juta rupiah"

DAFTAR LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA DITJEN PDASHL TAHUN 2018

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN LEMBAGA

REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA UTAMA PER SATKER TAHUN 2018

REALISASI FISIK RHL PER SATKER TAHUN 2018

REALISASI FISIK PEMBUATAN BANGUNAN KTA PER SATKER TAHUN 2018

REALISASI FISIK FASILITASI OPERASIONAL KPHL PER SATKER TAHUN 2018

REALISASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN LINGKUP DITJEN PDASHL
PER JENIS BELANJA TAHUN 2018

REALISASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN LINGKUP DITJEN PDASHL
PER SUMBER DANA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA DITJEN PDASHL TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG			
No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
a.	Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di hulu DAS,KPHL/Hutan Lindung, hutan mangrove, daerah tangkapan air dan sempadan danau prioritas, sempadan sungai, daerah imbuhan air tanah	Luas tutupan hutan dan hasil rehabilitasi	25.300 Ha
b.	Meningkatnya kesehatan DAS prioritas	Konservasi Tanah dan Air (Dam Penahan dan Gully Plug)	3.392 Unit
c.	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak	Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat	80 KPHL

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000)
	Pengendalian Das Dan Hutan Lindung	1.082.474.152
1.	Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air.	
2.	Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.	
3.	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS.	
4.	Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	
5.	Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.	
6.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.	
7.	Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.	
8.	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian DAS Dan Hutan Lindung.	

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jakarta, Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAS
DAN HUTAN LINDUNG

Dr. Ir. HILMAN MUGROHO, M.P
NIP. 19590615 198603 1 004

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN LEMBAGA

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan
Eselon I : Lindung
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di hulu DAS,KPHL/Hutan Lindung, hutan mangrove, daerah tangkapan air dan sempadan danau prioritas, sempadan sungai, daerah imbuhan air tanah dan hutan kota	Luas tutupan hutan dan hasil rehabilitasi	25.300 Ha	25.325 Ha	100,10%
b.	Meningkatnya kesehatan DAS prioritas	Terbangunnya bangunan Konservasi Tanah dan Air (dam pengendali, dam penahan dan <i>gully plug</i>)	3.392 Unit	3.424 Unit	100,94
c.	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak	Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat	80 KPH	80 KPHL	100,00 %

Jumlah Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 1.084.817.437.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 1.035.296.933.819,-

REALISASI FISIK INDIKATOR KINERJA UTAMA PER SATKER TAHUN 2018

No.	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Utama									
		Luas Tutupan Hutan dan Hasil Rehabilitasi				Konservasi Tanah dan Air				Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang Beroperasi Meningkatkan *)	
		PN Rawan Bencana (RHL Rawan Bencana, RHL Sempadan Sungai, dan RHL Mangrove)		PN Ketahanan Pangan (RHL Hulu DAS dan KPHL, RHL DTA Danau, serta RHL Imbuhan Mata Air)		PN Ketahanan Pangan (Dam Penahan dan Gully Plug)		PN Pengembangan Wilayah (Dam Penahan dan Gully Plug)			
		Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BP DASHL Krueng Aceh	560	560	375	375	60	60	170	170	5	5
2	BP DASHL Wampu Sei Ular	475	475	200	200	50	50	40	40	2	2
3	BP DASHL Asahan Barumon	500	500	382	382	50	50	30	30	4	4
4	BP DASHL Agam Kuantan	75	75	365	365	113	113	-	-	3	3
5	BP DASHL Batanghari	-	-	325	325	50	50	-	-	1	1
6	BP DASHL Indragiri Rokan	725	725	525	525	72	72	125	125	4	4
7	BP DASHL Musi	-	-	550	550	40	40	-	-	5	5
8	BP DASHL Ketahun	510	510	175	175	40	40	20	20	3	3
9	BP DASHL Way Seputih Sekampung	25	25	125	125	60	60	-	-	8	8
10	BP DASHL Cimanuk - Citanduy	2.055	2.055	-	-	-	-	252	252	-	-
11	BP DASHL Citarum - Ciliwung	2.500	2.500	125	125	12	24	310	310	-	-
12	BP DASHL Solo	900	900	-	-	-	-	175	195	-	-
13	BP DASHL Pemali Jratun	910	910	125	125	24	24	155	155	-	-
14	BP DASHL Serayu Opak Progo	750	750	-	-	-	-	170	170	-	-
15	BP DASHL Brantas	850	850	50	50	-	-	200	200	-	-
16	BP DASHL Barito	-	-	400	400	25	25	-	-	3	3
17	BP DASHL Kapuas	-	-	382	382	44	44	-	-	-	-
18	BP DASHL Kahayan	450	450	350	350	-	-	40	40	1	1
19	BP DASHL Mahakam Berau	400	400	132	132	24	24	40	40	2	2
20	BP DASHL Tondano	520	520	132	132	12	12	60	60	2	2
21	BP DASHL Bone Bolango	-	-	425	425	49	49	-	-	2	2
22	BP DASHL Palu Poso	710	710	125	125	6	6	115	115	1	1
23	BP DASHL Jeneberang Saddang	500	500	857	857	47	47	-	-	2	2
24	BP DASHL Sampara	-	-	450	485	25	25	-	-	3	3
25	BP DASHL Unda Anyar	300	300	125	115	12	12	25	25	2	2
26	BP DASHL Dodokan Moyosari	505	505	500	500	25	25	230	230	8	8
27	BP DASHL Benain Noelmina	780	780	500	500	25	25	150	150	5	5
28	BP DASHL Waehapu Batu Merah	400	400	-	-	-	-	15	15	2	2
29	BP DASHL Memberamo	50	50	525	525	-	-	-	-	3	3
30	BP DASHL Baturusa Cerucuk	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-
31	BP DASHL Sei Jang Duriangkang	200	200	-	-	-	-	40	40	1	1
32	BP DASHL Ake Malamo	-	-	275	275	50	50	-	-	2	2
33	BP DASHL Remu Ransiki	500	500	-	-	-	-	25	25	2	2
34	BP DASHL Lariang Mamassa	300	300	-	-	-	-	90	90	4	4
	Jumlah	16.800	16.800	8.500	8.525	915	927	2.477	2.497	80	80

*) Fasilitas KPHL terdiri dari :

Tata Batas Blok/Petak, Penyusunan Renstra Bisnis, Penyusunan Desain Tapak, Pengadaan Resort, Pengadaan Sarpras Kantor, Pengadaan Kendaraan Roda Empat dan dua, Penyediaan Sarpras Wisata Alam, Penyediaan Sarpras Pemanfaatan Hutan Lindung, Identifikasi Potensi, Produksi, Ekonomi HHBK dan Jasa Lingkungan, Patroli Pengamanan Hutan

REALISASI FISIK RHL PER SATKER TAHUN 2018

No	Satuan Kerja	RHL Kritis pada DAS Rawan/Pasca Bencana secara Vegetatif (Ha)	RHL Sempadan Sungai (Ha)	RHL Mangrove (Ha)	RHL DTA Irigasi Tersier di KPHL/HL (Ha)	RHL DTA Danau (Ha)	RHL Imbuhan Mata Air (Ha)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BPDASHL Krueang Aceh	500	10	50	375	-	-	935
2	BPDASHL Asahan Barumun	65	-	435	250	132	-	882
3	BPDASHL Wampu Sei Ular	400	-	75	200	-	-	675
4	BPDASHL Agam Kuantan	-	-	75	250	115	-	440
5	BPDASHL Indragiri Rokan	650	-	75	400	125	-	1.250
6	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	200	-	-	-	-	-	200
7	BPDASHL Batanghari	-	-	-	200	125	-	325
8	BPDASHL Ketahun	500	-	10	175	-	-	685
9	BPDASHL Musi	-	-	-	500	-	50	550
10	BPDASHL Baturusa Cerucuk	350	-	-	-	-	-	350
11	BPDASHL Way Seputih Sekampung	-	-	25	100	-	25	150
12	BPDASHL Cimanuk Citanduy	2.000	5	50	-	-	-	2.055
13	BPDASHL Citarum Ciliwung	2.500	-	-	-	125	-	2.625
14	BPDASHL Pemali Jratun	900	10	-	-	125	-	1.035
15	BPDASHL Solo	900	-	-	-	-	-	900
16	BPDASHL Serayu Opak Progo	750	-	-	-	-	-	750
17	BPDASHL Brantas Sampean	800	-	50	-	-	50	900
18	BPDASHL Kapuas	-	-	-	250	132	-	382
19	BPDASHL Kahayan	425	-	25	350	-	-	800
20	BPDASHL Barito	-	-	-	400	-	-	400
21	BPDASHL Mahakam Berau	400	-	-	-	132	-	532
22	BPDASHL Tondano	500	-	20	-	132	-	652
23	BPDASHL Bone Bolango	-	-	-	300	125	-	425
24	BPDASHL Palu Poso	700	10	-	-	125	-	835
25	BPDASHL Lariang Mamasa	300	-	-	-	-	-	300
26	BPDASHL Sampara	-	-	-	485	-	-	485
27	BPDASHL Jeneberang Saddang	500	-	-	575	257	25	1.357
28	BPDASHL Unda Anyar	300	-	-	-	115	-	415
29	BPDASHL Dodokan Moyosari	500	5	-	500	-	-	1.005
30	BPDASHL Benain Noelmina	750	10	20	500	-	-	1.280
31	BPDASHL Waehapu Batu Merah	400	-	-	-	-	-	400
32	BPDASHL Ake Malamo	-	-	-	275	-	-	275
33	BPDASHL Remu Ransiki	500	-	-	-	-	-	500
34	BPDASHL Memberamo	-	-	50	400	125	-	575
TOTAL		15.790	50	960	6.485	1.890	150	25.325

REALISASI FISIK PEMBUATAN BANGUNAN KTA PER SATKER TAHUN 2018

No	Satuan Kerja	Penyediaan Sumur Resapan Air di 15 DAS Prioritas (Unit)	Pembangunan Bangunan KTA untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Unit)		Pembangunan Bangunan KTA Pada DTA Danau untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Unit)		RHL Rawan/Pasca Bencana Secara Sipil Teknis untuk PN Pengembangan Wilayah (Unit)		JUMLAH (Unit)
			DPn	GP	DPn	GP	DPn	GP	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BPDASHL Krueng Aceh	-	15	45	-	-	20	150	230
2	BPDASHL Asahan Barumun	150	8	30	2	10	20	10	230
3	BPDASHL Wampu Sei Ular	-	10	40	-	-	20	20	90
4	BPDASHL Agam Kuantan	-	21	80	2	10	-	-	113
5	BPDASHL Indragiri Rokan	260	15	45	2	10	25	100	457
6	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	-	-	-	-	-	2	38	40
7	BPDASHL Batanghari	-	8	30	2	10	-	-	50
8	BPDASHL Ketahun	-	15	25	-	-	10	10	60
9	BPDASHL Musi	340	10	30	-	-	-	-	380
10	BPDASHL Baturusa Cerucuk	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BPDASHL Way Seputih Sekampung	200	15	45	-	-	-	-	260
12	BPDASHL Cimanuk Citanduy	-	-	-	-	-	52	200	252
13	BPDASHL Citarum Ciliwung	1.200	-	-	4	20	60	250	1.534
14	BPDASHL Pemali Jratun	-	-	-	4	20	30	125	179
15	BPDASHL Solo	900	-	-	-	-	30	165	1.095
16	BPDASHL Serayu Opak Progo	500	-	-	-	-	20	150	670
17	BPDASHL Brantas Sampean	1.500	-	-	-	-	40	160	1.700
18	BPDASHL Kapuas	40	5	15	4	20	-	-	84
19	BPDASHL Kahayan	-	-	-	-	-	15	25	40
20	BPDASHL Barito	-	10	15	-	-	-	-	25
21	BPDASHL Mahakam Berau	-	-	-	4	20	10	30	64
22	BPDASHL Tondano	-	-	-	2	10	10	50	72
23	BPDASHL Bone Bolango	110	10	15	4	20	-	-	159
24	BPDASHL Palu Poso	-	-	-	1	5	15	100	121
25	BPDASHL Lariang Mamasa	-	-	-	-	-	15	75	90
26	BPDASHL Sampara	-	10	15	-	-	-	-	25
27	BPDASHL Jeneberang Saddang	750	7	10	5	25	-	-	797
28	BPDASHL Unda Anyar	-	-	-	2	10	10	15	37
29	BPDASHL Dodokan Moyosari	50	5	20	-	-	30	200	305
30	BPDASHL Benain Noelmina	-	5	20	-	-	25	125	175
31	BPDASHL Waehapu Batu Merah	-	-	-	-	-	5	10	15
32	BPDASHL Ake Malamo	-	10	40	-	-	-	-	50
33	BPDASHL Remu Ransiki	-	-	-	-	-	10	15	25
34	BPDASHL Memberamo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		6.000	179	520	38	190	474	2.023	9.424

REALISASI FISIK FASILITASI OPERASIONAL KPHL PER SATKER TAHUN 2018

No	BPDASHL	Unit KPH (sesuai Penetapan Wilayah KPHL)	Fasilitas Tahun 2018												Ident pot. prod. ekonomi HHBK dan jasting (Keg)	Patroli pengamanan hutan (Keg)
			Tata Batas Blok/Petak (Keg)	Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (Keg)	Penyusunan Desain Tapak (Keg)	Pengadaan Resort (Unit)	Pengadaan Sarpras Kantor (Paket)	Pengadaan Sarpras Roda-4 (Unit)	Pengadaan Kendaraan Roda-2 (Unit)	Penyediaan Sarpras wisata alam (Paket)	Penyediaan Sarpras pemanfaatan HL (Paket)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	BPDASHL Krueng Aceh	1 Unit I	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1			
		2 Unit II	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1			
		3 Unit III	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1			
		4 Unit IV	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1			
		5 Unit V	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1			
2	BPDASHL Wampu Sei Ular	6 Unit VI	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1			
		7 Unit II Karo	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-			
3	BPDASHL Asahan Barumon	8 KPHL Unit XIV Toba Samsir	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-			
		9 Unit XXII Toba Samsir dan Labuhan Bt Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
		10 KPHL Unit XXIV Tapanuli Utara	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-			
		11 Unit XXVI Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-			
		12 Unit XVII S. Beram Hitam	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	BPDASHL Batanghari	13 Unit I Pasaman	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1			
		14 Unit III Agam	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1			
6	BPDASHL Indragiri Rokan	15 Unit IV Bukit Barisan	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-			
		16 Unit II Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
		17 Unit V Sijunjung	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
		18 Unit VI Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
		19 Unit XXXI Kuantan Singingi	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	1			
7	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	20 Unit II Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
		21 Unit I Banyuasin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
8	BPDASHL Musi	22 UNIT XII Dempo	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
		23 UNIT XIII Ogan Ulu	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
		24 UNIT XV Bukit Nanti	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
		25 Unit XVI Peraduan Gistang	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1			
		26 Unit III Lintas Kabupaten	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-			
9	BPDASHL Ketahun	27 Unit IV Seluma	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-			
		28 Unit VII Bukit Balai Rejang	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-			
		29 Unit II Liwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
		30 Unit VII Way Waya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
		31 Unit IX Batu Tegi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
10	BPDASHL Way Seputih WS	32 Unit X Kotaagung Utara	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1				
		33 Unit XI Pematang Neba	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1			
		34 Unit XII Pesawaran	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-			
		35 Unit XIV Rajabasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
		36 Unit XV Gunung Balak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
11	BPDASHL Unda Anyar	37 Unit I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
		38 Unit III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	BPDASHL Dodokan Moyosari	39 KPHL Unit I Rinjani Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
		40 KPHL Tastura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		41 Unit IV Rinjani Timur	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-			
		42 Unit VII Brang Rea	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-			
		43 Unit VIII Puncak Ngengas	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1			
13	BPDASHL Benain Noelmina	44 Unit XIV Ampang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		45 Unit XVI Toffo Pajo	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1			
		46 Unit XIX Ampang Soromandi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
		47 Unit II Manggarai	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1			
		48 Unit IV Ngada	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1			
14	BPDASHL Lembata	49 Unit IX Lembata	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1			
		50 Unit XAlor Pantar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
		51 Unit XXXI Belu	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1			
		52 KPHL Unit IV	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1			
		53 Unit IX Gerbang Barito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	BPDASHL Barito	54 Unit VIII Balangan	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1			
		55 Unit IX Hulu Sungai Selatan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-			
16	BPDASHL Mahakam Berau	56 Unit VI Tarakan	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-			
		57 Unit XXX Sungai Wain Manggar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
17	BPDASHL Jeneberang Saddang	58 Unit VIII Mamasa Tengah	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
		59 Unit IX Mamasa Timur	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1		
18	BPDASHL Lariang Mamasa	60 Unit II Lariang	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-			
		61 Unit III Sarudu	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1			
		62 Unit X Malunda	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		63 Unit XI Mapili	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-			
		64 Unit III	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-			
19	BPDASHL Palu Poso	65 Unit VIII Kulawi	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-			
		66 Unit II Gorontalo	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-			
20	BPDASHL Bone Bolango	67 Unit III Pohuwato	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
		68 KPHL Unit III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	BPDASHL Tondano	69 Unit VI Minahasa Utara	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
		70 Unit VII Peropa'ea	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
22	BPDASHL Sampara	71 Unit XIV Ueessi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
		72 Unit XXII Laiwai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		73 KPHL Unit XIV Kota Ambon	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1			
		74 Unit XV Kota Tual	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-			
		75 Unit I Pulau Morotai	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1			
23	BPASHL Waehapu Batu Merah	76 Unit II Tiabo	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1			
		77 Unit I Raja Ampat	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-			
24	BPDASHL Ake Malamo	78 Unit II Remu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
		79 Unit VI Mimika	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	BPDASHL Memberamo	80 Unit XX Biak Numfor	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-			
		81 Unit XLII Peg. Jayawijaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
JUMLAH			10	19	10	33	25	16	62	6	27	41	80			

REALISASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN LINGKUP DITJEN PDASHL PER JENIS BELANJA TAHUN 2018

No.	Instansi	Jenis Belanja									Jumlah		
		Belanja Pegawai			Belanja Barang			Belanja Modal			Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BPDASHL Krueng Aceh	4.108.365.000	3.616.712.514	88,03	27.187.815.000	26.910.012.839	98,98	770.000.000	768.080.000	99,75	32.066.180.000	31.294.805.353	97,59
2	BPDASHL Wampu Sei Ular	4.833.450.000	4.016.714.382	83,10	19.585.262.000	16.226.640.760	82,85	938.667.000	772.936.440	82,34	25.357.379.000	21.016.291.582	82,88
3	BPDASHL Asahan Barumun	4.235.820.000	3.991.099.937	94,22	25.285.328.000	22.979.833.976	90,88	350.691.000	349.730.900	99,73	29.871.839.000	27.320.664.813	91,46
4	BPDASHL Indragiri Rokan	4.566.895.000	4.436.071.857	97,14	33.534.357.000	31.776.177.404	94,76	292.782.000	289.631.249	98,92	38.394.034.000	36.501.880.510	95,07
5	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	3.419.435.000	3.325.087.632	97,24	10.270.901.000	9.507.302.350	92,57	468.300.000	466.861.600	99,69	14.158.636.000	13.299.251.582	93,93
6	BPDASHL Agam Kuantan	4.813.050.000	4.444.733.182	92,35	17.255.018.000	17.039.286.377	98,75	1.385.660.000	1.384.603.653	99,92	23.453.728.000	22.868.623.212	97,51
7	BPDASHL Batanghari	5.162.870.000	4.968.711.563	96,24	31.762.886.000	30.280.424.738	95,33	661.664.000	659.061.000	99,61	37.587.420.000	35.908.197.301	95,53
8	BPDASHL Ketahun	4.957.564.000	4.892.256.356	98,68	19.833.525.000	19.368.956.105	97,66	617.624.000	612.269.500	99,13	25.408.713.000	24.873.481.961	97,89
9	BPDASHL Musi	5.418.016.000	5.414.427.083	99,93	21.797.268.000	20.402.384.022	93,60	92.304.000	91.220.000	98,83	27.307.588.000	25.908.031.105	94,87
10	BPDASHL Baturusa Cerucuk	3.340.804.000	2.904.269.300	86,93	10.067.762.000	9.939.157.475	98,72	233.500.000	233.390.000	99,95	13.642.066.000	13.076.816.775	95,86
11	BPDASHL Way Seputih Way Sekampung	5.863.933.000	5.628.552.407	95,99	23.198.947.000	22.177.898.134	95,60	998.150.000	989.781.358	99,16	30.061.030.000	28.796.231.899	95,79
12	BPDASHL Cimanuk Citanduy	7.337.165.000	6.373.541.230	86,87	28.615.184.000	28.057.936.787	98,05	767.500.000	764.240.159	99,58	36.719.849.000	35.195.718.176	95,85
13	BPDASHL Citarum Ciliwung	7.930.046.000	6.188.607.807	78,04	61.128.531.000	57.288.735.036	93,72	80.000.000	79.800.000	99,75	69.138.577.000	63.557.142.843	91,93
14	BPDASHL Solo	6.410.496.000	5.811.497.113	90,66	26.304.253.000	26.175.907.366	99,51	545.750.000	533.932.000	97,83	33.260.499.000	32.521.336.479	97,78
15	BPDASHL Pemali Jratun	7.275.299.000	6.760.145.544	92,92	21.667.349.000	21.206.248.902	97,87	533.500.000	527.254.620	98,83	29.476.148.000	28.493.649.066	96,67
16	BPDASHL Serayu Opak Progo	6.910.197.000	6.276.657.413	90,83	20.634.505.000	20.423.548.413	98,98	689.301.000	683.966.900	99,23	28.234.003.000	27.384.172.726	96,99
17	BPDASHL Brantas Sampean	7.863.723.000	6.821.675.867	86,75	28.771.653.000	27.959.093.082	97,18	898.536.000	898.487.000	99,99	37.533.912.000	35.679.255.947	95,06
18	BPDASHL Barito	6.074.973.000	5.872.812.390	96,67	16.180.576.000	16.157.195.128	99,86	92.000.000	91.892.220	99,88	22.347.549.000	22.121.899.738	98,99
19	BPDASHL Kapuas	5.170.035.000	3.750.090.596	72,54	16.868.619.000	16.579.542.351	98,29	768.950.000	768.355.000	99,92	22.807.604.000	21.097.987.947	92,50
20	BPDASHL Kahayan	4.133.410.000	3.964.297.779	95,91	18.854.835.000	18.819.278.020	99,81	210.000.000	210.900.000	99,95	23.199.245.000	22.994.475.799	99,12
21	BPDASHL Mahakam Berau	4.979.717.000	4.718.103.124	94,75	19.363.771.000	18.906.177.164	97,64	207.330.000	206.650.870	99,47	24.550.818.000	23.830.931.158	97,07
22	BPDASHL Tondano	4.583.909.000	4.255.406.222	92,83	16.239.880.000	16.221.984.048	99,89	214.000.000	211.528.950	98,85	21.037.789.000	20.688.919.220	98,34
23	BPDASHL Bone Bolango	4.365.877.000	4.129.241.405	94,58	19.491.341.000	18.669.992.204	95,89	550.100.000	544.412.263	98,97	24.607.318.000	24.343.645.872	98,93
24	BPDASHL Palu Poso	5.248.695.000	4.822.896.258	91,89	23.333.963.000	22.234.590.570	95,29	760.500.000	749.030.000	98,49	29.343.158.000	27.806.516.828	94,76
25	BPDASHL Jeneberang Saddang	6.824.760.000	6.228.799.243	91,27	36.294.573.000	36.088.148.814	99,43	198.203.000	198.202.920	100,00	43.317.536.000	42.515.150.977	98,15
26	BPDASHL Sampara	5.935.362.000	5.620.620.841	94,70	14.952.335.000	14.783.947.607	98,87	194.000.000	193.816.500	99,90	21.081.477.000	20.598.382.948	97,71
27	BPDASHL Lariang Mamasa	4.794.408.000	3.858.682.418	80,48	18.871.020.000	18.859.942.328	99,94	1.146.830.000	1.146.020.568	99,93	24.812.258.000	23.864.645.294	96,18
28	BPDASHL Unda Anyar	5.034.170.000	4.478.237.650	88,96	16.782.025.000	16.723.790.550	99,65	348.491.000	347.161.600	99,56	22.164.886.000	21.549.369.800	97,22
29	BPDASHL Dodokan Moyosari	4.959.717.000	4.145.527.882	83,58	31.519.427.000	29.940.132.926	94,99	322.950.000	316.919.800	98,13	36.802.094.000	34.402.580.608	93,48
30	BPDASHL Benain Noelmina	4.915.692.000	4.804.608.055	97,78	31.249.767.000	31.196.409.150	99,83	790.691.000	789.477.750	99,88	37.136.150.000	36.972.494.955	99,56
31	BPDASHL Wae Hapu Merah Apu	5.064.183.000	4.696.172.657	92,54	13.579.167.000	13.100.206.111	96,47	128.000.000	126.863.000	99,11	18.771.350.000	17.913.241.768	95,43
32	BPDASHL Ake Malamo	3.725.005.000	3.330.018.420	89,40	11.108.568.000	11.055.280.495	99,52	91.000.000	90.924.635	99,92	16.924.573.000	16.476.223.750	97,00
33	BPDASHL Memberamo	4.912.230.000	3.804.019.509	77,48	23.727.062.000	18.511.574.091	78,02	80.000.000	19.500.000	24,38	28.719.292.000	22.337.095.600	77,78
34	BPDASHL Remu Ransiki	3.894.358.000	3.487.633.088	89,56	14.988.632.000	14.944.604.091	99,71	57.000.000	56.475.000	99,08	18.939.990.000	18.488.712.107	97,62
35	BPPT Wilayah I	4.126.242.000	3.877.454.068	93,97	6.460.344.000	6.324.710.455	97,90	425.000.000	421.557.000	99,19	11.011.588.000	10.623.723.523	96,48
36	BPPT Wilayah II	4.999.151.000	4.949.896.995	99,01	8.333.285.000	8.331.851.015	99,98	242.000.000	241.750.000	99,90	13.574.436.000	13.523.498.010	99,62
37	Sekretariat Ditjen PDASHL	28.510.428.000	26.703.310.638	93,66	26.061.206.000	25.793.250.190	98,97	1.000.000.000	985.747.840	98,57	55.571.634.000	53.482.308.668	96,24
38	Direktorat PEPDAS	-	-	-	7.272.354.000	7.219.380.320	99,27	100.000.000	99.904.364	99,90	7.372.356.000	7.319.284.684	99,28
39	Direktorat KTA	-	-	-	16.035.506.000	15.689.188.029	97,84	220.000.000	218.700.000	99,41	16.255.506.000	15.907.888.029	97,86
40	Direktorat KPHL	-	-	-	4.175.000.000	4.148.658.470	99,37	495.000.000	492.805.700	99,56	4.670.000.000	4.641.464.170	99,39
41	Direktorat PTH	-	-	-	5.690.047.000	5.674.590.620	99,73	121.282.000	121.014.340	99,78	5.811.329.000	5.795.604.960	99,73
42	Direktorat PKPD	-	-	-	4.215.700.000	4.205.385.394	99,76	100.000.000	99.950.680	99,95	4.315.700.000	4.305.336.074	99,76
JUMLAH		216.699.430.000	197.362.592.625	91,08	848.749.551.000	818.899.535.835	96,48	19.368.456.000	19.034.805.359	98,28	1.084.817.437.000	1.035.296.933.819	95,44

REALISASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN LINGKUP DITJEN PDASHL PER SUMBER DANA TAHUN 2018

No	Satuan Kerja	Rupiah Murni				PNBP		Sumber Dana								Jumlah	
								RM Pendamping		Hibah Luar Negeri							
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	BPDASHL Krueang Aceh	17.849.590.000	17.287.007.135	96,85	14.216.590.000	14.007.798.218	98,53	-	-	-	-	-	-	32.066.180.000	31.294.805.353	97,59	
2	BPDASHL Wampu Sei Ular	12.257.634.000	10.330.516.214	84,28	13.099.745.000	10.685.775.368	81,57	-	-	-	-	-	-	25.357.379.000	21.016.291.582	82,88	
3	BPDASHL Asahan Barumon	15.160.899.000	14.002.155.425	92,36	14.710.940.000	13.318.509.386	90,53	-	-	-	-	-	-	29.871.839.000	27.329.664.813	91,46	
4	BPDASHL Indragiri Rokan	18.040.837.000	17.773.200.541	98,52	20.353.197.000	18.728.479.969	92,02	-	-	-	-	-	-	38.594.034.000	34.501.880.510	95,07	
5	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	9.105.725.000	8.487.207.182	93,21	5.052.911.000	4.812.044.400	95,23	-	-	-	-	-	-	14.158.634.000	13.299.251.582	93,93	
6	BPDASHL Agam Kuantan	11.579.515.000	11.204.857.169	96,76	11.874.213.000	11.663.766.043	98,23	-	-	-	-	-	-	23.453.728.000	22.868.623.212	97,51	
7	BPDASHL Batanghari	10.873.576.000	10.418.149.991	95,81	6.903.408.000	6.659.888.705	96,47	1.800.000.000	1.696.606.440	94,26	18.010.436.000	17.133.552.165	95,13	37.587.420.000	35.908.197.301	95,53	
8	BPDASHL Ketahun	14.682.047.000	14.447.315.703	98,40	10.726.666.000	10.426.166.258	97,20	-	-	-	-	-	-	25.408.713.000	24.873.481.961	97,89	
9	BPDASHL Musi	15.972.294.000	15.014.450.552	94,00	11.335.294.000	10.893.580.553	96,10	-	-	-	-	-	-	27.307.588.000	25.908.031.105	94,87	
10	BPDASHL Baturusa Cerucuk	8.074.186.000	7.536.872.059	93,35	5.567.880.000	5.539.944.716	99,50	-	-	-	-	-	-	13.642.064.000	13.074.816.775	95,86	
11	BPDASHL Way Seputih Sekampung	17.894.890.000	16.967.749.258	94,82	12.166.140.000	11.828.462.641	97,22	-	-	-	-	-	-	30.061.030.000	28.796.231.899	95,79	
12	BPDASHL Cimanuk - Citanduy	19.067.674.000	17.737.611.812	93,02	17.652.175.000	17.458.106.364	98,90	-	-	-	-	-	-	36.719.849.000	35.195.718.176	95,85	
13	BPDASHL Citarum - Cilwiung	32.780.746.000	28.837.172.291	87,97	36.357.811.000	34.719.970.552	95,50	-	-	-	-	-	-	69.138.577.000	63.557.142.843	91,93	
14	BPDASHL Solo	17.776.384.000	17.100.227.268	96,20	15.484.115.000	15.421.109.211	99,59	-	-	-	-	-	-	33.260.499.000	32.521.336.479	97,78	
15	BPDASHL Pemali Jralan	17.103.723.000	16.340.292.640	95,54	12.272.425.000	12.153.356.424	98,23	-	-	-	-	-	-	29.476.148.000	28.493.649.066	96,67	
16	BPDASHL Serayu Opak Progo	16.233.907.000	15.456.272.398	95,21	12.000.094.000	11.927.900.328	99,40	-	-	-	-	-	-	28.234.003.000	27.384.172.726	96,99	
17	BPDASHL Brantas Sampean	22.628.897.000	21.295.214.740	94,11	14.905.015.000	14.384.041.209	96,50	-	-	-	-	-	-	37.533.912.000	35.679.255.649	95,06	
18	BPDASHL Barito	13.452.023.000	13.233.493.067	98,38	8.895.526.000	8.888.406.671	99,92	-	-	-	-	-	-	22.347.549.000	22.121.899.738	98,99	
19	BPDASHL Kapuas	14.318.762.000	12.695.124.171	88,66	8.488.842.000	8.402.863.776	98,99	-	-	-	-	-	-	22.807.604.000	21.097.987.947	92,50	
20	BPDASHL Kahayan	12.371.750.000	12.179.593.890	98,45	10.827.495.000	10.814.881.909	99,88	-	-	-	-	-	-	23.199.245.000	22.994.475.799	99,12	
21	BPDASHL Mahakam Berau	12.706.834.000	12.239.269.750	96,32	11.843.982.000	11.591.661.408	97,87	-	-	-	-	-	-	24.550.818.000	23.830.931.158	97,07	
22	BPDASHL Tondano	12.186.289.000	11.841.506.314	97,17	8.851.500.000	8.847.412.906	99,95	-	-	-	-	-	-	21.037.789.000	20.688.199.220	98,34	
23	BPDASHL Bone Bolango	15.963.573.000	15.703.674.088	98,37	8.643.745.000	8.639.971.784	99,96	-	-	-	-	-	-	24.607.318.000	24.343.645.872	98,93	
24	BPDASHL Palu Poso	13.668.700.000	12.885.958.228	94,27	10.972.015.000	10.823.523.950	98,65	559.313.000	468.401.900	83,75	4.143.130.000	3.628.632.750	87,58	29.343.158.000	27.806.516.828	94,76	
25	BPDASHL Jeneberang Saddang	21.789.089.000	21.007.463.582	96,41	21.528.447.000	21.507.687.395	99,90	-	-	-	-	-	-	43.317.536.000	42.515.150.977	98,15	
26	BPDASHL Sampara	12.933.783.000	12.537.729.748	96,94	8.147.894.000	8.060.453.200	98,93	-	-	-	-	-	-	21.081.677.000	20.598.382.948	97,71	
27	BPDASHL Lariang Mamasa	15.052.890.000	14.106.006.743	93,71	9.759.368.000	9.758.638.551	99,99	-	-	-	-	-	-	24.812.258.000	23.864.645.294	96,18	
28	BPDASHL Uda Anyar	12.885.881.000	12.298.614.600	95,44	9.279.005.000	9.250.755.200	99,70	-	-	-	-	-	-	22.164.886.000	21.649.369.800	97,22	
29	BPDASHL Dodokan Moyosari	17.092.680.000	15.661.684.054	91,63	19.709.414.000	18.740.896.554	95,09	-	-	-	-	-	-	36.802.094.000	34.402.580.680	93,48	
30	BPDASHL Benain Noetmina	17.642.730.000	17.492.335.105	99,15	19.493.420.000	19.480.159.850	99,93	-	-	-	-	-	-	36.972.494.955	36.972.494.955	99,56	
31	BPDASHL Waeahu Batu Merah	11.170.540.000	10.402.961.344	93,13	7.600.810.000	7.510.280.404	98,81	-	-	-	-	-	-	18.711.350.000	17.913.241.768	95,43	
32	BPDASHL Ake Malamo	9.714.773.000	8.687.388.544	89,31	5.809.800.000	5.788.835.186	99,64	-	-	-	-	-	-	14.924.573.000	14.474.223.750	97,00	
33	BPDASHL Memberamo	16.576.122.000	12.740.785.312	76,86	12.143.170.000	9.596.310.288	79,03	-	-	-	-	-	-	28.719.292.000	22.337.095.600	77,78	
34	BPDASHL Remu Ransiki	11.188.550.000	10.744.434.487	96,03	7.751.440.000	7.744.277.620	99,91	-	-	-	-	-	-	18.939.990.000	18.488.712.107	97,62	
35	BPTH Wilayah I	8.130.263.000	7.781.486.770	95,71	2.881.325.000	2.842.236.753	98,64	-	-	-	-	-	-	11.011.588.000	10.623.723.523	96,48	
36	BPTH Wilayah II	10.729.096.000	10.678.500.726	99,53	2.845.340.000	2.844.997.284	99,99	-	-	-	-	-	-	13.574.436.000	13.523.498.010	99,62	
37	Sedtilijen PDAS-HL	55.571.634.000	53.482.308.668	96,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.571.634.000	53.482.308.668	96,24	
38	Direktorat PEPDAS	7.372.356.000	7.319.284.684	99,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.372.356.000	7.319.284.684	99,28	
39	Direktorat KTA	5.816.000.000	5.746.337.605	98,80	-	-	-	950.000.000	936.237.450	98,55	9.489.506.000	9.225.312.974	97,22	16.255.506.000	15.907.888.029	97,86	
40	Direktorat KPHL	4.670.000.000	4.641.464.170	99,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.670.000.000	4.641.464.170	99,39	
41	Direktorat PTH	5.811.329.000	5.795.604.960	99,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.811.329.000	5.795.604.960	99,73	
42	Direktorat PKPD	4.315.700.000	4.305.336.074	99,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.315.700.000	4.305.336.074	99,76	
JUMLAH		619.413.893.000	586.444.639.102	94,65	430.251.159.000	415.763.551.038	96,63	3.309.313.000	3.101.265.790	93,71	31.643.072.000	29.987.497.889	94,77	1.084.817.437.000	1.035.294.933.819	95,44	